

**PENGEMBANGAN WISATA SYARIAH DALAM MENDORONG
PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
(STUDI WISATA HALAL NUSA TENGGARA BARAT)**

HASIL PENELITIAN

Penelitian Dosen Kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
(LP2M) Insitut Agama Islam Negeri Palangka Raya



Oleh:

**Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, SH., MH.
Rahmad Kurniawan, S.E.Sy., ME
Wahyu Akbar, S.E.Sy., ME**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
1441 H/2019 M**

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN HASIL RISET

Judul Penelitian : Pengembangan Pariwisata Syariah dalam Mendorong
Pertumbuhan ekonomi Daerah (Studi Wisata Halal Nusa
Tenggara Barat)

Bidang Ilmu : Ekonomi

Jenis Penelitian : Penelitian Lapangan (field reseach)

Pendekatan : Kualitatif

Nama Peneliti : Dr. Ibnu Elmi A. S. Pelu, S.H., M.H
Rahmad Kurniawan, S.E.Sy., M.E
Wahyu Akbar, S.E.Sy., M.E

Telah diseminarkan Hasil Penelitian : Pada tanggal 29 September 2019 dengan Penguji Utama
Bapak Dr. Miftahul Huda, M.Ag

Waktu Penelitian : 8 Bulan (April – November)

Biaya : Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

Sumber Dana : DIPA IAIN Palangka Raya Tahun 2019
Sk Direktur Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama
Republik Indonesia Nomor: 5459 Tahun 2018 tentang
petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian
pada PTKIN Tahun 2019

Dasar Kegiatan :

Palangka Raya, Desember 2019

Mengetahui
Kepala Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (LP2M)



Ajahari, M.Ag

NIP. 19710302 199803 1 004

Peneliti



Dr. Ibnu Elmi A. S. Pelu, S.H., M.H

NIP. 19750109 199903 1 002

Disahkan oleh
Rektor IAIN Palangka Raya



Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag
NIP. 19630118 199103 1 002

LEMBAR KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya melakukan penelitian yang berjudul, **“Pengembangan Pariwisata Syariah dalam Mendorong Pertumbuhan ekonomi Daerah (Studi Wisata Halal Nusa Tenggara Barat)”**, adalah benar-benar karya sendiri dan bukan hasil plagiarism/ karya orang lain yang tidak sesuai dengan kode etik penulisan ilmiah.

Apabila penelitian ini dikemudian hari terdapat kekeliruan dan ketidaksesuaian dengan pernyataan tersebut diatas, maka sepeneuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, Desember 2019
Peneliti



Dr. Ibnu Elmi A. S. Pelu, S.H., M.H
NIP. 19750109 199903 1 002

PENGEMBANGANWISATA SYARIAH DALAM MENDORONG
PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH (STUDI WISATA HALAL NUSA
TENGGARA BARAT)

Ibnu Elmi A.S Pelu,¹ Rahmad Kurniawan,² Wahyu Akbar,³
^{1,2,3}State Islamic Institute of Palangka Raya
Email: ibnu.elmi@iain-palangkaraya.ac.id,¹ rahmad.kurniawan@iain-palangkaraya.ac.id,² wahyu.akbar@iain-palangkaraya.ac.id,³

Abstract

This research discusses the development of halal tourism to encourage and increase tourist arrivals and improve the regional economy of West Nusa Tenggara Province (NTB) as a halal tourism destination. As well as legal policies in the development of halal tourism in the West Nusa Tenggara Province. This study uses a qualitative research approach to the concept of halal tourism, a statute approach, a sharia economic contextual approach. The results of this study indicate firstly that the development of Islamic tourism by presenting itself as a halal tourist destination that does not turn off other tourism and is also a vehicle for a particular choice of product model in West Nusa Tenggara is considered successful in attracting foreign tourist visits, especially tourists from Muslim country and attract investment. The development of halal tourism also experienced a positive increase in economic growth in the province of NTB, at least seen from data released by the NTB Tourism Office and from Bank Indonesia data which states that economic growth in this region without the mining sector in 2016 reached 5.72% / year increased in 2017 it reached 7.10% / year and in 2018 despite the earthquake it continued to increase to 7.23% / year. Both of the legal policies in West Nusa Tenggara already have strong legal legitimacy, so they can guarantee legal certainty in the development of halal tourism destinations. So that halal tourism destinations in West Nusa Tenggara have clear policy directions in their ideas, are strongly supported by policies, and are gradually implemented.

Keyword: Development , Halal Tourism, West Nusa Tenggara

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pengembangan pariwisata halal untuk mendorong dan meningkatkan kunjungan wisatawan dan meningkatkan ekonomi daerah bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai destinasi wisata halal. Serta kebijakan hukum dalam pengembangan wisata halal di kawasan Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan konsep pariwisata halal, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kontekstual ekonomi syariah (*sharia economic contextual approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan *Pertama* dari sisi *road map* wisata halal yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengembangkan kelanjutan dari pariwisata halal yang sudah ada dengan mencanangkan 99 desa wisata halal yang berkearifan lokal. Selain itu pengembangan pariwisata syariah dengan menampilkan diri sebagai destinasi wisata halal yang tidak mematikan wisata lainnya dan juga merupakan sebuah wahana model produk pilihan (*choice*) secara khusus yang ada di Nusa Tenggara Barat dianggap berhasil dapat menarik kunjungan wisatawan mancanegara terutama wisatawan dari negara Muslim dan menarik investasi. Perkembangan wisata halal juga mengalami peningkatan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB, setidaknya terlihat dari data yang dirilis Dinas Pariwisata NTB dan dari data Bank Indonesia yang menyebutkan pertumbuhan ekonomi daerah ini tanpa sektor tambang pada tahun 2016 mencapai 5,72 %/tahun meningkat di tahun 2017 mencapai 7,10 %/tahun dan pada tahun 2018 meskipun terjadi gempa tetap meningkat menjadi 7,23 %/tahun. *Kedua* dari sisi kebijakan hukum yang ada di Nusa Tenggara Barat sudah mempunyai legitimasi hukum yang kuat, sehingga bisa menjamin kepastian hukum dalam pengembangan destinasi pariwisata halal. Sehingga destinasi pariwisata halal yang ada di Nusa Tenggara Barat arah kebijakannya jelas dalam gagasannya, sangat didukung oleh kebijakan, dan bertahap dalam implementasi.

Keyword: Pengembangan, Wisata Halal, Nusa Tenggara Barat

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala rahmat dan puji kepada Allah SWT, Dzat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah menganugerahkan keberkahan berupa ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “ **PENGEMBANGAN PARIWISATA SYARIAH DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH (STUDI WISATA HALAL NUSA TENGGARA BARAT)**”. Serta tidak lupa shalawat dan salam semoga tercurahkan atas baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan berbagai pihak. Penelitian ini tidak terlepas dari bantuan orang-orang yang benar-benar ahli dengan bidang penelitian sehingga sangat membantu penulis untuk menyelesaikannya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bertujuan untuk membangun dalam kesempurnaan penelitian ini. Akhirnya, penulis mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca terlebih khususnya bagi penulis.

Palangka Raya, Desember 2019
Peneliti

Dr. Ibnu Elmi A. S. Pelu, S.H., M.H
NIP. 19750109 199903 1 002

DAFTAR ISI

Sampul	i
Abstract	ii
Abstrak	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
a. Manfaat Teoritis	6
b. Manfaat Praktis	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kerangka Teori	11
1. Teori Pembangunan Hukum	11
2. Teori Kebijakan Publik	17
3. Teori Sistem	20
4. Teori Maqashid Asy Syariah	21
C. Kerangka Konseptual	30
1. Pengembangan	30
2. Pariwisata	34
3. Kosep Pariwisata Halal	46
4. Pembangunan Ekonomi Daerah	55
BAB III METODELOGI PENELITIAN	57

A. Metode Penelitian	57
B. Data dan Sumber Data Penelitian	58
C. Tempat dan Waktu Penelitian	58
D. Teknik Pengumpulan Data	59
1. Teknik Observasi	59
2. Teknik Wawancara	59
3. Dokumentasi	60
E. Analisis Data	60
F. Pemeriksaan Keabsahan Data	61
1. Kredibilitas	61
2. Transferabilitas	61
3. Dependabilitas	61
4. Konfirmabilitas	61
 G. Pengabsahan Data	 61
H. Analisis Data	62
 BAB IV PEMAPARAN DATA	 64
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	64
1. Letak Geografi Provinsi Nusa Tenggara Barat	64
2. Gambaran Wisata Halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat	66
B. Penyajian Data Penelitian	70
1. Subjek Pertama Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Barat	70
2. Subjek Kedua Masyarakat	74
C. Analisis Data	77
1. Konsep Pengembangan Wisata Halal yang Ditawarkan di kawasan Nusa Tenggara Barat	77

2. Kebijakan Hukum dalam Pembangunan Wisata Halal yang Ditawarkan di kawasan Nusa Tenggara Barat	93
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2018 menjadi tahun “mahal dan berkah” bagi Indonesia, jika mampu mengenalkan besarnya potensi ekonomi, alam, budaya dan nilai-nilai agama di mata ekonomi dunia. Berdasarkan data *State of the Global Islamic Economy 2017-2018*,¹ bahwa pangsa pasar muslim terhadap industri halal global dari sisi pengeluaran mencapai 11,9% pada tahun 2016 dan diproyeksikan meningkat dari USD 2.006 miliar menjadi USD 3.081 miliar pada tahun 2022. Indonesia harus mampu memanfaatkan dan turut berpartisipasi ditengah besarnya *market share* umat muslim dunia. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, saat ini populasi muslim Indonesia berjumlah lebih dari 226,2 juta jiwa. Populasi umat Islam terbesar di dunia tersebut tentu saja secara alamiah telah memberi energi yang positif terhadap gerakan ekonomi dan bisnis berbasis pada prinsip syariah.

Indonesia memiliki banyak sekali kelembagaan *existing* yang bergerak dibidang ekonomi, keuangan dan bisnis syariah. Dibidang halal ekonomi dan keuangan, Indonesia memiliki 13 Bank Umum Syariah (BUS) dan 1.822 kantor dengan 49.971 tenaga kerja. Gerakan transaksi keuangan syariah juga di dukung dengan hadirnya BUMN syariah dan 348 kantor Unit Usaha Syariah (UUS) dengan 4.834 tenaga kerja. Indonesia juga memiliki 168 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan 458 kantor dan didukung 4.865 sumber daya yang expert dibidang ekonomi syariah. Total aset keuangan syariah Indonesia mengalami peningkatan dari sebesar USD 47,6 miliar pada tahun 2016 menjadi USD 81,8 miliar pada tahun 2017 atau meningkat dari peringkat ke-9 menjadi

¹Outpacing The Mainstream, *State of the Global Islamic Economy Report 2017/2018*, h. 25.

peringkat ke-7 di dunia. Hingga 31 Mei 2018, total aset keuangan syariah terus meningkat mencapai USD 82,33 miliar.

Tidak hanya itu, negara dengan penduduk 87% muslim ini telah memiliki aset investasi bursa efek pada Efek Syariah yang tidak sedikit yaitu sebanyak 381 efek syariah. Berdasarkan report OJK tahun 2018, Efek syariah juga mengalami peningkatan yang signifikan dengan total aset USD 44,97 dengan market share 14,90 %. Dibidang pertanian ada 11 efek syariah, dibidang pertambangan berjumlah 31 efek syariah, bidang industri dasar dan kimia sebanyak 55 efek syariah, dibidang aneka industri terdapat 28 efek syariah, dibidang barang konsumsi sebanyak 35 efek syariah, dibidang properti dan *real estate* serta konstruksi bangunan terdapat 56 efek syariah, dibidang infrastruktur dan utilitas serta transportasi sebanyak 45 efek syariah, dibidang keuangan ada 5 efek syariah, dibidang perdagangan jasa dan investasi berjumlah 102 efek syariah, dibidang perusahaan publik ada 4 efek syariah, dan ada 9 efek syariah yang belum masuk daftar efek syariah di Indonesia.

Selain itu pada sektor usaha kecil dan ritel, masyarakat Indonesia memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 59,2 juta UMKM konvensional dan UMKM berbasis syariah, ada sekitar 160.000 Koperasi dengan 1,5% merupakan koperasi simpan pinjam berdasarkan prinsip syariah. Menguatnya kepedulian sosial masyarakat, pada tahun 2018, Indonesia memiliki 20 Bank Wakaf Mikro dengan 4.152 nasabah dan 6.800 kelompok usaha.

Gerakan ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya disektor mainstream pada ekonomi dan keuangan syariah, namun juga telah menyusup pada riil bisnis yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Indonesia memiliki banyak Cafe Syariah, ada 730 Hotel Syariah dengan rata-rata pertumbuhan 10 % setiap tahun, ada 10 Rumah Sakit Syariah, ada 3 pemakaman berbasis prinsip syariah seperti 1 Pemakaman Syariah di Semarang Jawa Tengah dan 2 di Jawa Barat. Gerakan ekonomi syariah juga eksis dalam lapangan ekonomi yang lebih luas, yaitu

dengan hadirnya 2 Pasar Tradisional Syariah yang terletak di Surabaya Jawa Timur dan Lombok Barat di Nusa Tenggara Barat. Nilai-nilai halal juga menyentuh wisata halal, seperti 2 Pantai Syariah yang terletak di Lombok Nusa Tenggara Barat dan Banyuwangi di Jawa Timur, halal cultural destination di Aceh, halal culinary destination di Sumatera Barat dll. Di era milenial dan berkembangnya informasi dan teknologi keuangan, Indonesia juga mengembangkan market place dibidang *fintech* syariah.

Berbagai kelambagaan halal dan ekonomi syariah di atas, menjadi bukti kuat bahwa Indonesia telah berhasil mengembangkan dan merasakan manfaat kehadiran industri-industri halal baik halal ekonomi dan keuangan, termasuk industri *halal food* dan *beverage*, industri halal fashion, kosmetik dan farmasi yang menggeliat akhir-akhir ini. Khusus untuk halal travel dan tourism, Indonesia telah memiliki 13 destinasi pariwisata halal yang tersebar dari Aceh, Sumatera Barat, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lombok-Nusa Tenggara Barat, Banten, hingga Sulawesi Selatan. Menurut data *Global Muslim Travel Index* (GMTI) 2018 Indonesia menempati peringkat ke-2 sebagai destinasi pariwisata halal dunia. Alhasil, *track record* industri halal yang telah menyentuh berbagai sektor, telah memberi stigma yang positif bahwa Indonesia menjadi salah satu kiblat pengembangan kelembagaan ekonomi syariah terbesar dan pusat halal dunia.²

Lebih lanjut terkait perkembangan pariwisata di Indonesia mengalami tren positif. Pada tahun 2015 sektor ini mampu memberikan sumbangan terhadap PDB, devisa dan lapangan kerja. PDB nasional tahun 2015 mencapai 10 % dengan nominal tertinggi di ASEAN. Pertumbuhan PDB pariwisata nasional tumbuh 4,8 % dengan tren naik hingga 6,9 %. Hal cukup tinggi jika dibandingkan dengan sektor agrikultural, manufaktur, otomotif, dan pertambangan. Devisa

²Mastercard & Crescentrating, *Global Muslim Travel Index 2018*, GMTI, April 2018, h. 18.

pariwisata memiliki nilai 1 juta dolar di tahun 2015 dengan nilai PDB mencapai 1,7 juta dolar. Sektor ini juga memberikan sumbangan yang cukup baik dalam membuka lapangan pekerjaan, sektor ini mampu menyumbang hingga 9,8 juta lapangan pekerjaan.³

Lingkup internasional, pariwisata dunia mengalami berbagai perkembangan tren, salah satunya pariwisata halal atau halal tourism. Jenis pariwisata ini merupakan segmen wisata dengan memberikan fasilitas kebutuhan dasar yang diperlukan oleh wisatawan Muslim sesuai dengan hukum Islam. Namun, fasilitas pariwisata halal juga dapat dinikmati oleh wisatawan yang bukan beragama Islam, karena secara keseluruhan inti dari fasilitas yang dimaksudkan hanya mengacu pada fasilitas makanan maupun minuman dengan label halal, restoran halal, dan hotel syariah.

Mengacu pada perkembangan tersebut, sangatlah penting bagi Indonesia untuk membangun pariwisata halal. Salah satu daerah yang dinilai sangat baik untuk pengembangan wisata halal adalah Nusa Tenggara Barat yang memiliki visi “Beriman, Berbudaya, Berdaya Saing dan Sejahtera”. Kata ‘Beriman’ pada awal visi ini merupakan gambaran masyarakat Nusa Tenggara Barat yang memegang teguh agamanya dan menjalankan kehidupan sehari-harinya sesuai dengan agamanya masing-masing. Mengingat masyarakat Nusa Tenggara Barat mayoritas memeluk agama Islam, menjadikan daerah ini sesuai untuk pengembangan wisata halal. Sebagai hasilnya, Nusa Tenggara Barat mendapatkan penghargaan dari World Halal Travel Summit yang diselenggarakan di Abu Dhabi selama dua tahun berturut-turut (2015-2016) dengan predikat: destinasi wisata halal terbaik dunia, pariwisata halal honeymoon terbaik dunia, serta laman wisata halal terbaik.⁴

³Alwafi Ridho Subarkah, *Diplomasi Pariwisata Halal Nusa Tenggara Barat*, Intermestic: Journal of International Studies, Volume 2, No. 2, Mei 2018 (188-203), doi:10.24198/intermestic.v2n2.6, h. 190.

⁴*Ibid.*, h. 93

Untuk dapat mewujudkan dan menampung perkembangan ekonomi syariah dan khususnya wisata halal terbaik di dunia, maka Indonesia melalui lembaga-lembaga hukum harus dapat memainkan peranannya yang penting di dalam penyesuaian keadaan idea-idea dan kondisi yang cepat berkembang. Walaupun banyak pakar yang telah memposisikan pentingnya hukum dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa, namun sampai sekarang Presiden belum menjadikan pembangunan hukum sebagai prioritas utama untuk menopang pembangunan ekonomi. Saat ini, pembangunan yang dilakukan sepertinya dibiarkan mengalir begitu saja tanpa orientasi.

Hal ini menjadi kelemahan utama bidang hukum yang sering dihadapi oleh pelaku ekonomi di Indonesia adalah masalah ketidak pastian hukum. Padahal kepastian hukum juga dibutuhkan untuk memperhitungkan dan mengantisipasi resiko, bahkan bagi suatu negara kepastian hukum merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang daya tahan ekonomi suatu Negara. Di dalam rangka agar hukum mampu memainkan peranannya untuk memberikan kepastian hukum pada pelaku ekonomi, maka pemerintah bertanggungjawab menjadikan hukum berwibawa dengan jalan merespon dan menindaklanjuti keinginan para pelaku ekonomi. Sehingga kedepan diharapkan hukum mampu memainkan peranannya sebagai faktor pemandu, pembimbing, dan menciptakan iklim kondusif pada bidang ekonomi terutama di bidang kehalalan industri maupun dalam wisata halal berbasis syariah.

Berdasarkan fenomena dan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang pengembangan pusat halal di Indonesia, hal ini menjadi bahasan penelitian yang berjudul: “PENGEMBANGAN WISATA SYARIAH DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH (STUDI WISATA HALAL NUSA TENGGARA BARAT)”

B. Rumusan Masalah

Fokus masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pengembangan wisata halal yang ditawarkan di kawasan Nusa Tenggara Barat?
2. Bagaimana kebijakan hukum dalam pengembangan wisata halal di kawasan Nusa Tenggara Barat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengembangan wisata halal di Nusa Tenggara Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pengembangan wisata halal di Nusa Tenggara Barat.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memperkaya keilmuan dalam pengaturan dan pengembangan wisata halal di Indonesia.
 - b. Sebagai bahan pengkajian dalam pembangunan dan pengembangan wisata halal di Indonesia sehingga secara lebih luas akan mampu meningkatkan ekspektasi masyarakat untuk melaksanakan syariat Islam secara multi disipliner di bidangnya hukum dan ekonomi syariah.
 - c. Sebagai kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum dan ekonomi syariah khususnya dalam pembangunan dan pengembangan wisata halal di Indonesia.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Sebagai bahan rujukan atau referensi mengenai pembangunan hukum pengembangan wisata halal di Indonesia.

- b. Menjadi salah satu bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam substansi penelitian dengan melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Dari beberapa penelusuran penulis terhadap literatur yang ada, penulis menemukan penelitian dan tulisan yang sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang penulis angkat, yaitu:

Pertama jurnal penelitian yang ditulis Panji Adam, dengan judul “Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Pengesahan UUJPH menimbulkan pro-kontra dari berbagai pihak. Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum Nasional di Indonesia mempunyai kedudukan yang sentral karena sudah menjadi regulasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, Fatwa halal yang dihasilkan oleh MUI ditaati dan dipatuhi oleh pemerintah dan umat Islam. Pemerintah mematuhinya seperti tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang ada.⁵

Kedua, jurnal penelitian ditulis oleh Adrian Adi Hamzana dengan judul “Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal dalam Pengembangan Pariwisata di Nusa Tenggara Barat”. Penelitian ini menyimpulkan Provinsi NTB mendapatkan 3 (tiga) penghargaan di ajang *The World Halal Tourism Awards* 2016. Pemerintah kemudian menunjuk NTB sebagai salah satu destinasi wisata halal nasional dan sebagai salah satu dari 10 (sepuluh) destinasi prioritas yang memiliki visi “*World’s Best Halal Tourism and Cruise Destination*”. Pemerintah

⁵Panji Adam, *Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam*, Jurnal Amwaluna, Vol.1 No.1, Januari, 2017, h. 150.

Daerah mengambil langkah dengan mengesahkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan standarisasi pelayanan pariwisata halal di NTB pada destinasi dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB melalui pemenuhan fasilitas umum sesuai pariwisata halal. Standarisasi pada industri pariwisata halal dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Kesehatan, serta MUI-NTB sebagai lembaga non-pemerintah berwenang mengeluarkan sertifikat halal. Faktor-faktor yang mempengaruhi standarisasi pelayanan pariwisata halal di NTB adalah faktor hukum (peraturan perundang-undangan), struktur hukum (penegak hukum), faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.⁶

Ketiga, jurnal penelitian yang ditulis oleh Lies Afroniyawati dengan judul “Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan bahwa Di Indonesia, sertifikasi halal diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak tahun 1989. Sejak awal penerbitannya, MUI banyak menemui masalah, utamanya menyangkut kewenangan dan legitimasi. Hal ini disebabkan tidak adanya produk hukum yang jelas tentang penyebutan MUI sebagai lembaga yang sah dalam penerbitan sertifikasi halal. Masalah yang dihadapi semakin beragam pasca runtuhnya Orde Baru. Kementerian Agama mengajukan Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) pada DPR RI yang dalam beberapa pasal meminta agar kewenangan penerbitan sertifikasi halal diambil alih dari MUI ke tangan kementerian tersebut. RUU tersebut mengundang kontroversi pada beberapa pihak yang bersikap pro dan

⁶Adrian Adi Hamzana, *Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal dalam Pengembangan Pariwisata di Nusa Tenggara Barat*, Jurnal Pena Justisia : Media Komunikasi dan Kajian Hukum, Vol. 17, No.2, 2017, h. 1.

kontra. Di sisi lain, ditemukan beberapa produk yang telah berlabel halal dari MUI tetapi mengandung DNA babi. MUI tetap pada pendiriannya untuk tetap menerbitkan sertifikasi halal. Sikap ini kemudian menimbulkan pertanyaan, ada kepentingan apa di balik upaya MUI tetap mempertahankan sertifikasi halal. Sejarah munculnya kebijakan sertifikasi halal di Indonesia dimulai ketika penelitian milik Tri Sutrisno dari Universitas Brawijaya merilis fakta bahwa banyak produk yang beredar mengandung DNA babi. Penemuan tersebut menggemparkan masyarakat hingga mengganggu aktivitas perekonomian. MUI mengambil langkah inisiatif dengan menerbitkan sertifikasi halal sebagai solusi meredam isu sekaligus melindungi hak-hak umat Islam. Namun, inisiatif tersebut tidak disertai dengan dasar hukum sehingga terjadi perebutan kewenangan diantara badan-badan pemerintah. Namun, MUI sendiri mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu dengan tetap mempertahankan haknya menerbitkan sertifikasi halal.⁷

Ketiga penelitian yang sudah dilakukan para peneliti sebelumnya, penulis menilai bahwa penelitian dengan judul “PEMBANGUNAN HUKUM PENGEMBANGAN PUSAT HALAL DI INDONESIA ” belum banyak diteliti, hal itu terlihat dari penelitian yang sudah dilakukan oleh:

Kedudukan Peneliti dalam penelitian ini adalah ingin menganalisa secara khusus Bagaimana pembangunan hukum pengembangan pusat halal di indonesia.

Untuk memudahkan dalam membedakan penelitian Peneliti dengan para peneliti sebelumnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel.1: *Perbedaan dan Persamaan serta kedudukan PenelitianPeneliti*

No	Nama, Judul, Tahun, dan Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Kedudukan Penelitian
1	Panji Adam, dengan judul “Kedudukan	Mengkaji Sertifikasi	Kedudukan Sertifikasi Halal	Meneliti pembangunan

⁷Lies Afroniyawati, *Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia*, Jurnal Kebijakan & Adminstrasi Publik JKAP, Vol. 18 No.1, Mei 2014, h. 37.

	Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam”, 2017, penelitian deskriptif analitis”	Halal	Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam	hukum pengembangan pusat halal di Indonesia
2	Adrian Adi Hamzana, “Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal dalam Pengembangan Pariwisata di Nusa Tenggara Barat” 2017, penelitian deskriptif	Mengkaji Pariwisata Halal	Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal dalam Pengembangan Pariwisata di NTB	
3	Lies Afroniyawati dengan judul “Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia” 2014 Penelitian	Mengkaji Sertifikasi Halal	Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh MUI	

B. Kerangka Teori

1. Teori Pembangunan Hukum

Pada suatu masyarakat hukum, fungsi perencanaan dan penanggulangan itu dilakukan dengan memanfaatkan hukum. *Pertama*, hukum merupakan hasil penjelajahan ide dan pengalamam manusia dalam mengatur hidupnya. Hukum merupakan bentuk pengaturan kehidupan manusia yang diyakini sebagai desain pengaturan hidup manusia yang paling modern dan representatif. *Kedua*, terbawa oleh hakekat pengadaan dan keberadaan hukum dalam suatu masyarakat. Termasuk di dalamnya pengaturan terhadap perubahan yang terjadi , atau yang hendak dilakukan oleh masyarakat. *Ketiga*,

fungsi mengatur itu telah didukung oleh potensi dasar yang terkandung dalam hukum, yang melampaui fungsi mengatur, yaitu juga berfungsi sebagai pemberi kepastian, pengaman, pelindung, dan penyeimbang, yang sifatnya dapat tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.

Potensi hukum terletak pada dua dimensi utama dari fungsi hukum, yaitu fungsi preventif dan represif. Preventif adalah fungsi pencegahan. Fungsi ini dituangkan dalam bentuk pengaturan pencegahan yang hakekatnya merupakan desain dari setiap tindakan yang hendak dilakukan oleh masyarakat. Sedangkan represif adalah fungsi penanggulangan yang dituangkan dalam bentuk penyelesaian sengketa atau pemulihan terhadap kerusakan keadaan yang diakibatkan oleh risiko tindakan yang terlebih dahulu telah ditetapkan dalam perencanaan tindakan itu. Keempat, dalam isu pembangunan global itu hukum telah dipercaya untuk mengemban misinya yang paling baru, yaitu sebagai sarana perubahan sosial atau sarana pembangunan.⁸

Kepercayaan ini didasarkan pada kekekatan dan potensi hukum sebagai inti kehidupan masyarakat. Pembangunan dan pembaharuan hukum dapat berbentuk rekonstruksi, intensifikasi fungsi, atau pengembangan fungsi. Rekonstruksi itu dapat berbentuk penggantian, penataan, pengelolaan, dan pengembangan hukum. Penggantian hukum dilakukan terhadap hukum yang telah kekurangan atau kehabisan daya dukungannya. Dalam hal ini hukum ditempatkan tidak hanya pada makna hukum normatif, melainkan terutama dalam konteks makna hukum sebagai suatu sistem. Dalam pembangunan hukum, terdapat hubungan yang saling mempengaruhi yang sangat erat antara teori hukum, teori pembangunan hukum, konsep pembangunan hukum, pelaksanaan pembangunan hukum, dan hasil pembangunan hukum. Suatu

⁸Netty Endrawati, *Sistem Hukum dan Pembangunan Hukum*, Wastu, Volume Khusus, Desember 2007, h. 42-45.

konsep pembangunan hukum yang didasari teori hukum positif akan terarah pada pembangunan hukum dalam bentuk kodifikasi hukum, atau pembangunan hukum yang didasari teori hukum kebiasaan akan terarah pada pembangunan hukum dalam bentuk penggalan asas hukum kebiasaan atau peningkatan fungsi hakim dalam telaah kasus dan putusannya.

Pemikir terkemuka mazhab Hukum Historis yaitu Von Savigny menyatakan bahwa hukum sebagai suatu formulasi kaidah yang bersumber pada jiwa rakyat, yang hakekatnya merupakan suatu kesamaan pengertian dalam kesatuan jiwa yang organis. Menurutnya hukum bukanlah suatu aturan yang dibuat melainkan yang tumbuh dan berkembang sebagai kebiasaan hukum, yang secara berulang-ulang terjadi dan ditaati oleh masyarakat sebagai suatu aturan yang mengatur hidupnya. Teori-teori hukum yang berpengaruh kuat terhadap konsep-konsep pembangunan hukum adalah teori hukum positif, teori hukum sosiologis, dan teori hukum pragmatis.⁹ Pengaruh teori hukum positif dapat dilihat dari dominannya konsep kodifikasi hukum dalam sejumlah masyarakat hukum kenegaraan, masyarakat hukum internasional dan masyarakat hukum tradisional. Adapun pengaruh teori hukum sosiologis, antropologis dan teori hukum pragmatis dapat dilihat melalui meningkatnya kompleksitas unsur-unsur kemasyarakatan yang dipertimbangkan dalam pembentukan hukum. Para penganut teori hukum positif menyatakan “kepastian hukum” merupakan tujuan hukum. Bahwa keteraturan atau keteraturan tidak akan terwujud tanpa adanya garis-garis perilaku kehidupan yang pasti.

Keteraturan hanya akan ada jika ada kepastian dan untuk adanya kepastian hukum haruslah dibuat dalam bentuk yang pasti pula yaitu dalam bentuk tertulis. Pendapat tersebut memperoleh dukungan dari berbagai kalangan ahli hukum karena faktanya memang demikian. Tetapi amatlah

⁹Sheila Fakhria, *Madzhab Hukum Islam, Jurnal Tribakti (Jurnal Pemikiran Keislaman)*, Volume 26 Nomor 1 Januari 2015, h. 190.

penting meng ingat kembali, kritik yang dilontarkan terhadap bentuk tertulis itu, bahwa dalam bentuknya yang tertulis itu hukum dapat dijawab oleh sifatnya yang kaku sehingga akan sulit mengantisipasi perkembangan atau masyarakat manusia. dengan demikian kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian yang fleksibel, bukan dalam arti dapat ditafsir secara luas, melainkan bersifat lengkap, konkret, prediktif, dan antisipatif. Para penganut hukum alam mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Dianggapnya bahwa satu-satunya tujuan hukum yang terutama adalah keadilan. Hukum ada atau diadakan adalah untuk mengatur dan menciptakan keseimbangan atau harmonisasi kepentingan manusia. Meskipun demikian ketiga tujuan hukum itu sering diungkapkan secara terpisah dan dianggap suatu proses yang saling menentukan satu sama lain, yaitu “kepastian”, “keteraturan/ketertiban”, dan “keadilan”.

Keteraturan tidak mungkin terwujud tanpa kepastian dan orang tidak akan mungkin mempermasalahkan keadilan dalam ketidakaturan. Namun, ketiga tujuan tersebut sering pula hanya diungkapkan dengan kata “keteraturan”, dengan asumsi bahwa tujuan lainnya itu hanyalah sekedar konsekuensi dari kata keteraturan. Dalam perkembangan yang senyatanya, keadilan bukanlah satu-satunya istilah yang digunakan untuk menunjukkan tujuan hukum pasca keteraturan. Suatu negara hukum yang modern (welfare state), tujuan hukum adalah untuk mewujudkan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat negara itu. Tujuan ini pada mulanya diintruksikan oleh para penganut aliran hukum *Utilitarian*, dan dalam perspektif internasional, hukum bertujuan untuk menciptakan keamanan, perdamaian, kesejahteraan, keselamatan alam, dan keterlanjutan kehidupan manusia.

Sistem hukum tersusun atas sejumlah subsistem sebagai komponennya yang saling berkaitan dan berinteraksi sebagaimana telah dipaparkan pada pembahasan pertama di atas. Namun demikian komponen sistem hukum

tersebut adakalanya dipersempit menjadi tiga unsur, seperti yang dikemukakan oleh Mochtar Kusuma admadja memandang komponen sistem hukum terdiri dari asas-asas dan kaidah-kaidah kelembagaan hukum dan proses perwujudan kaidah-kaidah dalam kenyataan.

Schuit sebagai sosiolog hukum berpendapat bahwa sistem hukum itu dapat dipandang tersusun atas tiga komponen (subsistem) yaitu: 1) Unsur ideal yang meliputi keseluruhan aturan, kaidah, pranata dan asashukum, yang dalam peristilahan teori sistem dapat dibackup dengan istilah sistem makna atau Sistem Lambang atau Sistem Referensi. Aturan adalah lambang yang memberikan kesatuan dan makna pada kenyataan majemuk dari perilaku manusia. Dengan lambang-lambang itu maka dapat dimengerti dan dipahami kemajemukan dari perilaku manusia itu, dan dengan itu akan dapat memberikan arti pada perilaku manusia, sehingga semuanya itu memungkinkan terjadi nya interaksi antar manusia yang bermakna yang disebut komunikasi. 2) Unsur operasional yang mencakup keseluruhan organisasi, lembaga dan pejabat. Unsur ini meliputi badan-badan eksekutif, legislatif dan yudikatif dengan aparatnya masing-masing, seperti birokrasi pemerin tahan, pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, advokat, konsultan, notaris, dan Lembaga Bantuan Hukum. 3) Unsur aktual yang mencakup keseluruhan keputusan dan tindakan (perilaku), baik para pejabat maupun para warga masyarakat, sejauh keputusan dan tindakan itu dapat ditempatkan dalam kerangka sistem makna yuridik.

Pembangunan hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Kebijakan Pembangunan Lima Tahun Keenam yang ditetapkan dalam GBHN 1993 ditujukan pada semua unsur sistem hukum dalam arti luas, yakni mencakup: a) Materi hukum yang menunjuk pada unsur idiil sistem hukum (sistem makna yuridis) atau tata hukum; b) Aparatur hukum yang perumusannya jelas menunjuk kepada unsur operasional sistem hukum (kelembagaan hukum) dan

unsur aktual sistem hukum (proses dan budaya hukum); c) Sarana dan prasarana hukum yang menunjang pada penunjang pelaksanaan pembangunan aktua lisasi hukum semua unsur sistem hukum. Secara formal, sebagian besar pembangunan unsur operasional (kelembagaan hukum) sudah dilaksanakan yaitu dengan diberlakukannya berbagai undang-undang.

Adapun pembangunan hukum yang harus dilakukan adalah melengkapi kekurangannya serta mengkaji ulang yang sudah terlaksana untuk menyempurnakan, baik segi kualitas substansi maupun segi kualitas konsistensinya.. Sistem hukum nasional harus bersumber dari sosio-budaya, sistem filsafat atau ideologi bangsa, yang mencerminkan jiwa atau semangat rakyatnya dan cita hukum bangsa, sebagai penjabaran dari filsafat negara yaitu Pancasila dan UUD 1945

Secara keseluruhan suatu sistem hukum itu bermanfaat dan mempunyai kekuatan imperatif. Secara teoretis komponen-komponen suatu sistem hukum meliputi struktur sistem hukum, yakni kelem bagaan yang menetapkan dan melaksanakan substansi hukum. Dalam pembentukan sistem hukum perlu dilakukan secara sadar dan terarah menurut orientasi ideologis. Dengan demikian Pancasila sebagai ideologi nasional memberikan ketentuan mendasar sebagai berikut : 1) Sistem hukum dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila; 2) Hukum bertujuan mewujudkan keadilan demi kepentingan orang banyak sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat; 3) Sistem hukum berfungsi untuk menjaga dinamika kehidupan bangsa dan dapat memberikan perspektif ke depan; dan 4) Faktor adat dan tradisi dapat memberikan sumbangan positif dalam rangka pembentukan sistem hukum nasional. Adapun sifat utama sistem hukum meliputi sifat normatif, melembaga, dan imperatif.¹⁰

¹⁰Netty Endrawati, *Sistem Hukum dan Pembangunan Hukum*, Wastu, Volume Khusus, Desember 2007, h. 42-45.

Teori pembangunan hukum sangat relevan digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji arah kebijakan dalam pembangunan hukum pengembangan pusat halal di Indonesia, baik dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Teori pembangunan hukum menjadi kerangka acuan dalam mengembangkan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis pengembangan hukum dalam rangka pengembangan pusat halal di Indonesia.

2. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik.¹¹ Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideology dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara. Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkahlaku dari mereka yang membuat dan dari mereka mematuhi keputusan. Adapun dari Carl Friedrich, yang mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan terutama dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang di maksud.¹²

¹¹Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: CV Alfabeta, 2008, h. 3.

¹²Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015, h. 5.

Menurut Bridgman dan Davis (2005) dalam Edi Suharto menerangkan kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai “*whatever government choose to do or not to do*”. Artinya, kebijakan publik adalah “apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Sedangkan menurut Hogwood dan Gunn (1990) Edi Suharto menyatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Ini tidak berarti bahwa makna “kebijakan” hanyalah milik atau dominan pemerintah saja. Organisasi-organisasi non-pemerintah, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Sosial (Misalnya Karang Taruna, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga/PKK) dan lembaga-lembaga sukarela lainnya memiliki kebijakan-kebijakan pula. Menurut Bridgeman dan Davis, dalam Edi Suharto menerangkan bahwa kebijakan publik setidaknya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (*objective*), sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum (*authoritative choice*), dan sebagai hipotesis (*hypothesis*). *Pertama*, kebijakan publik sebagai tujuan Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian publik. Artinya, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. *Kedua*, kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Keputusan itu mengikat para pegawai negeri untuk bertindak atau mengarahkan pilihan tindakan atau kegiatan seperti menyiapkan rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dipertimbangkan oleh parlemen atau mengalokasikan anggaran guna mengimplementasikan program tertentu. *Ketiga*, kebijakan publik sebagai hipotesis Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan-kebijakan senantiasa

bersandar pada asumsi mengenai perilaku. Kebijakan selalu mengandung insentif yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu.

Kebijakan juga selalu memuat disinsentif yang mendorong orang tidak melakukan sesuatu. Kebijakan harus mampu menyatukan perkiraan-perkiraan mengenai keberhasilan yang akan dicapai dan mekanisme mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi. Dalam kaitannya dengan definisi-definisi tersebut di atas maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik. *Pertama*, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak. *Kedua*, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. *Ketiga*, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa yang dimaksud dikerjakan atau akan dikerjakan. Keempat, kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan, secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan. Kelima, kebijakan publik paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

Teori kebijakan publik dalam penelitian ini digunakan untuk mengarahkan pengembangan pusat halal melalui kebijakan publik yang sesuai dengan tata regulasi dalam konteks pembangunan hukum. Teori kebijakan publik menjadi kaidah dalam membangun kebijakan pengembangan pusat halal di Indonesia melalui lembaga pemerintah maupun non pemerintahan.

3. Teori Sistem

Secara umum sistem dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hal atau kegiatan atau elemen atau subsistem yang saling bekerja sama atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan.¹³ Model umum suatu sistem menurut Edhy Sutanta dalam bukunya Sistem Informasi Manajemen adalah terdiri dari masukan (*input*), proses (*process*) dan keluaran (*output*).

Gambar 2.1. Model Sistem



Sumber: Buku Sistem Informasi manajemen¹⁴

Lebih lanjut sistem adalah pengertian yang paling banyak dipakai dalam ilmu hukum, ilmu politik dan hubungan internasional pada saat ini. Sistem dapat dijelaskan sebagai:

- a. Kerangka teoritis untuk mengumpulkan data mengenai fenomena hukum atau politik.
- b. Kesatu integrasi saling berhubungan berdasarkan serangkaian hipotesa variabel politik, misalnya sistem internasional yang melibatkan pemerintah dunia.
- c. Serangkaian hubungan diantara variabel politik dalam sebuah sistem internasional misalnya sistem bipolar. Satu set variabel interaksi.

Teori sistem merujuk pada serangkaian pernyataan mengenai hubungan diantara variabel dependen dan independen yang diasumsikan berinteraksi

¹³Edhy Sutanta, *Sistem Informasi Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003, h. 4

¹⁴*Ibid.*, h.7.

satu sama lain. Artinya perubahan dalam satu atau lebih dari satu variabel bersamaan atau disusul dengan perubahan variabel lain atau kombinasi variabel. Anatol Rapoport menyatakan, “satu kesatuan yang berfungsi sebagai satu kesatuan karena bagian-bagian yang saling bergantung dan sebuah metode yang bertujuan menemukan bagaimana sistem ini menyebabkan sistem yang lebih luas yang disebut sistem teori umum”.

Sebuah sistem bisa longgar atau ketat, stabil atau tidak stabil. Sistem lebih kecil yang disebut subsistem mungkin hidup dalam sistem yang lebih luas. Sebuah sistem memiliki batas-batas yang membedakan dari lingkungan. Setiap sistem merupakan jaringan komunikasi yang membuka aliran informasi untuk proses penyesuaian diri. Setiap sistem memiliki inputs dan outputs. Sebuah output satu sistem mungkin menjadi input sistem lain yang biasa juga disebut “*feedback*”.

Teori sistem menjadi teori yang relevan dalam penelitian ini, sebab teori sistem menjadi suatu kaidah yang digunakan untuk melihat sejauh mana berjalannya pembangunan hukum dan pengembangan pusat halal di Indonesia. Pembangunan hukum pengembangan pusat halal merupakan suatu sistem yang berjalan secara beraturan dan terkait satu sama lain, sehingga pembangunan hukum akan menjadi efektif dalam pengembangan pusat halal di Indonesia.

4. Teori *Maqashid Asy Syariah*

Tujuan ekonomi Islam atau ekonomi syariah yaitu mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Tujuan tersebut terlihat ketika konsep harta dan keuntungan yang dikembangkan merupakan instrumen kepastian hukum untuk menjamin aliran kekayaan dari kelompok mampu kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan yang berguna untuk menyelamatkan jiwa manusia (*hifdz al-nafs*) dan memelihara harta (*hifdz al-mal*). Penjelasan

tersebut, menempatkan keselamatan jiwa dan harta sebagai basis utama tujuan syariah. Inilah tujuan (*maqasid*) *al-muamalahal-iqtishadiyah* yang sesungguhnya, yang berbeda dengan transaksi ekonomi lainnya.

Secara etimologis, *maqasid al-syari'ah* adalah tujuan hukum. Hukum Islam dalam konsep normatif maupun aplikatif harus mampu mewujudkan dan selaras dengan tujuan hukum Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan, kebaikan, ketentraman dan kesejahteraan. Adapun *maslahah* adalah kemanfaatan atau kebaikan. Menurut Asmawi,¹⁵ teori maslahat ternyata melalui reformulasi oleh para ulama ahli *ushul* sepanjang sejarah hukum Islam. Tentu saja dalam perjalanan sejarah tersebut terdapat dinamika pemikiran dalam formulasi teori maslahat. Maslahat dikemukakan oleh beberapa tokoh atau pakar hukum dengan rumusan susbtansi yang berbeda namun dalam tataran urgensi *maslahah* mereka bersepakat sepenuhnya bahwa teori *maslahah* merupakan teori *multi-fungsi* dalam berbagai masalah dalam dimensi hukum.

Tokoh-tokoh pencetus teori *maslahah* di antaranya adalah Iman al-Ghazali (w. 505 H). Secara etimologis, makna *genuine* teori *maslahah* diungkapkan oleh al-Ghazali bahwa *maslahah* adalah mewujudkan kemanfaatan dan menyingkirkan kemudharatan.¹⁶ Al-Ghazali mengkatagori *maslahah* dalam 3 tingkat yaitu *daruriyyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan skunder) dan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier). Masing-masing tingkat kebutuhan tersebut disempurnakan lagi dengan perumusan objek atau sasaran 3 tingkat *maslahah* yang dikenal dengan *ushul al-khamsah* (5 prinsip dasar jaminan) yaitu *hifdzu al-din*, *hifdzu al-nafs*, *hifdzu al-'aql*, *hifdzu al-nasl* dan *hifdzu al-mal*. Lima prinsip ini kemudian disempurnakan lagi oleh

¹⁵ Asmawi, *Teori Maslahah dan Relevansinya dengan PerUndang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag. RI, 2010), hlm. 35.

¹⁶ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustasyfa min Ilmi al-Ushul*, *Tahqiq wa Tahliq Muhammad Sulaiman al-Asyqar*, (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1997), Juz ke-I, hlm. 416-417.

Shihab al-Dindengan menambahkan *hifdzu al-'ird* (kehormatan) dan selanjutnya, para intelektual muslim Ali Yafie merumuskan konsep baru dan memasukkannya sebagai bagian dari konsep *maqashid as-asyari'ah*, yaitu *hifdzul-bi'ah* (menjaga lingkungan), hingga muncul apa yang disebut fiqih lingkungan (*fiqih al-bi'ah; environment islamic law*).¹⁷ Teori *mashlahah* yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali, bahwa teks-teks al-Qur'an dan Sunnah Nabi sengaja dihadirkan untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Kemaslahatan adalah tujuan dari aturan-aturan Islam. Imam al-Ghazali menyebutnya dengan istilah *maqasid syar'iyah* (tujuan hukum Islam).¹⁸

Secara bahasa *Maqa>shid Asy Syariah* terdiri dari dua kata yaitu *Maqa>shid* dan *Syari'ah*. *Maqa>shid* berarti kesengajaan atau tujuan, *Maqa>shid* merupakan bentuk jama' dari *maqsud* yang berasal dari suku kata *Qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan, *Maqa>shid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.¹⁹ Sedangkan *Syariah* secara bahasa berarti على مورد الماء أى مكان ورود الناس للماء artinya Jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.²⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah syariah adalah “Hukum agama yang diamalkan menjadi peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Alquran dan hadis.”²¹

Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa *Maqa>shid Asy Syariah* adalah nilai-nilai dan sasaran *syara* yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai

¹⁷Shihab al-Din al-Qarafy, *Syarah Tanqih al-Fushul fi Ihtisar al-Mahsul fi Usul*, (Mesir: Maktabah al-Khairiyah, tth), hlm. 89.

¹⁸Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustasyfa min Ilmi al-Ushul, Tahqiq wa Tahliq Muhammad Sulaiman al-Asyqar*, (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1997), Juz ke-I, hlm. 281.

¹⁹Ahmad Qorib, *Ushul Fikih 2*, Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997, h. 170.

²⁰Fazlur Rahman, *Islam*, Terjemahan Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1994, h. 140.

²¹Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, h. 1402.

tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh *al-syari'* dalam setiap ketentuan hukum.²² Yusuf Al-Qardhawi mendefenisikan *Maqa>shid Asy Syariah* sebagai tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah, dan umat, atau juga disebut dengan *hikmat-hikmat* yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak. Karena dalam setiap hukum yang disyari'atkan Allah kepada hambanya pasti terdapat *hikmat*, yaitu tujuan luhur yang ada di balik hukum.²³

Ulama Ushul Fiqih mendefinisikan *Maqa>shid Asy Syariah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki *syara'* dalam mensyari'atkan suatu hukum bagi kemashlahatan umat manusia. *Maqa>shid Asy Syariah* di kalangan ulama ushul fiqih disebut juga *asrar al-syari'ah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh *syara'*, berupa kemashlahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Misalnya, *syara'* mewajibkan berbagai macam ibadah dengan tujuan untuk menegakkan agama Allah SWT. Kemudian dalam perkembangan berikutnya, istilah *Maqa>shid Asy Syariah* ini diidentik dengan filsafat hukum Islam.²⁴

Menurut Imam al-Ghazali, "Tujuan utama syariah adalah mendorong kesejahteraan manusia, yang terletak dalam perlindungan terhadap agama mereka (*li h}ifdz al din*), diri (*li h}ifdz an nafs*), akal (*li h}ifdz al 'akl*), keturunan (*li h}ifdz al nasl*), harta benda (*li h}ifdz al ma>l*).²⁵ Apa saja yang menjamin terlindungnya lima perkara ini berarti melindungi kepentingan umum dan dikehendaki." Implikasi lima perkara ini dalam ilmu ekonomi perlu disadari bahwa tujuan suatu masyarakat muslim adalah untuk berjuang

²²Edi kurniawan, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penalaran Hukum Islam*, artikel. t.d

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.*

²⁵M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Terjemahan Ikhwan Abidin B, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, h. 7.

mencapai cita-cita ideal. Perlunya mendorong pengayaan perkara-perkara ini secara terus-menerus sehingga keadaan makin mendekat kepada kondisi ideal dan membantu umat manusia meningkatkan kesejahteraannya secara kontinu. Banyak usaha dilakukan oleh sebagian fuqaha untuk menambah lima perkara dan mengubah urutannya, namun usaha-usaha ini ini tampaknya tidak memuaskan para fuqaha lainnya. Imama asy syatibi, menulis kira-kira tiga abad setelah Imam al-Ghazali, menyetujui daftar dan urutan Imam Ghazali, yang menunjukkan bahwa gagasan itu dianggap sebagai yang paling cocok dengan esensi syariah.²⁶

Ilmu ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan maqashid asy syariah menurut as-Shatibi yaitu menjaga agama (li hifdz al din), jiwa manusia (li hifdz an nafs), akal (li hifdz al 'aql), keturunan (li hifdz al nasl) dan menjaga kekayaan (li hifdz al mal) tanpa mengekang kebebasan individu.²⁷

Maqashid membahas masalah mengenai, pengayaan agama, diri, akal, keturunan, dan harta benda sebenarnya telah menjadi fokus utama usaha semua manusia. Manusia itu sendiri menjadi tujuan sekaligus alat. Tujuan dan alat dalam pandangan al-Ghazali dan juga para fuqaha lainnya, saling berhubungan satu sama lain dan berada dalam satu proses perputaran sebab-akibat. Realisasi tujuan memperkuat alat dan lebih jauh akan mengintensifkan realisasi tujuan. Imama al-Ghazali dan asy-Syatibi mengurutkan keimanan (agama), kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda secara radikal berbeda dari urutan ilmu ekonomi konvensional, di mana keimanan tidak memiliki tempat, sementara kehidupan, akal, dan keturunan, sekalipun dipandang

²⁶M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, Terjemahan Ikhwani Abidin B, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 102.

²⁷Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, h. 2.

penting, hanya dianggap variabel eksogenous (di luar sistem). Karena itu, tidak mendapatkan perhatian yang memadai.²⁸

a. Peran Keimanan (Agama)

Keimanan ditempatkan di urutan pertama karena menyediakan pandangan dunia yang cenderung berpengaruh pada kepribadian manusia perilakunya, gaya hidupnya, cita rasa dan presentasinya, dan sikapnya terhadap orang lain, sumber-sumber daya dan lingkungan. Iman berdampak signifikan terhadap hakikat, kuantitas, dan kualitas kebutuhan materi dan psikologi dan juga cara memuaskannya. Iman menciptakan keseimbangan antara dorongan materiil dan spiritual dalam diri manusia, membangun kedamaian pikiran individu, meningkatkan solidaritas keluarga dan sosial.²⁹

Islam mengajarkan manusia menajalani kehidupannya secara benar, sebagaimana telah diatur oleh Allah. Bahkan, usaha untuk hidup secara benar dan menjalani hidup secara benar inilah yang menjadikan hidup seseorang bernilai tinggi. Ukuran baik buruk kehidupan sesungguhnya tidak diukur dari indikator-indikator lain melainkan dari sejauh mana seseorang manusia berpegang teguh kepada kebenaran. Untuk itu, manusia membutuhkan suatu pedoman tentang kebenaran dalam hidup, yaitu agama (*dien*). Seorang Muslim yakin bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan diridhai Allah. Islam telah mencakup keseluruhan ajaran kehidupan secara komprehensif. Jadi, agama merupakan kebutuhan manusia yang paling penting. Islam mengajarkan bahwa agama bukanlah hanya ritualitas, namun agama berfungsi untuk menuntun keyakinan, memberikan ketentuan atau aturan berkehidupan

²⁸*Ibid.*, h. 102.

²⁹*Ibid.*

serta membangun moralitas manusia. Oleh karena itu, agama diperlukan oleh manusia kapanpun dan di manapun ia berada³⁰.

Ekonomi Islam membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan *maqashid*, tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkepanjangan, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat. Iman juga menyediakan filter moral yang menyuntikkan makna hidup dan tujuan dalam diri manusia ketika menggunakan sumber-sumber daya, dan memberikan mekanisme motivasi yang diperlukan bagi beroperasinya secara objektif. Filter moral bertujuan menjaga kepentingan individu (*self interest*) dalam batas-batas kemaslahatan sosial (*social interest*).³¹

b. Peran diri atau jiwa raga (*an nafs*)

Kehidupan jiwa raga (*an nafs*) di dunia sangat penting, karena merupakan ladang bagi tanaman yang akan dipanen di kehidupan akhirat nanti. Apa yang akan diperoleh di akhirat tergantung pada apa yang telah dilakukan di dunia. Kehidupan sangat dijunjung tinggi oleh ajaran Islam, sebab ia merupakan anugerah yang diberikan Allah kepada hambanya untuk dapat digunakan sebaik-baiknya. Tugas manusia di bumi adalah mengisi kehidupan dengan sebaik-baiknya, untuk kemudian akan mendapat balasan pahala atau dosa dari Allah. Oleh karena itu, kehidupan merupakan sesuatu yang harus dilindungi dan dijaga sebaik-baiknya. Segala sesuatu yang dapat membantu eksistensi kehidupan otomatis merupakan kebutuhan, dan sebaliknya segala sesuatu yang mengancam kehidupan pada dasarnya harus di jauhi.

³⁰P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, h. 6.

³¹M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam.*, h. 103, lihat juga Muhammad, Rahmad Kurniawan, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam (Kajian Spirit Ethico Legal atas Prinsip Taradin dalam Praktik Bank Islam Modern*, Malang: Intimedia, 2014, h. 34.

c. Peran Akal

Untuk dapat memahami alam semesta (ayat-ayat *kauniyah*) dan ajaran agama dalam Alquran dan Hadis (ayat-ayat *qauliyah*) manusia membutuhkan ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan maka manusia tidak akan dapat memahami dengan baik kehidupan ini sehingga akan mengalami kesulitan dan penderitaan. Oleh karena itu, Islam memberikan perintah yang sangat tegas bagi seorang Mukmin untuk menuntut ilmu.

d. Peran Keturunan (*nasl*)

Untuk menjaga kontinuitas kehidupan, maka manusia harus memelihara keturunan dan keluarganya (*nasl*). Meskipun seorang Mukmin meyakini bahwa horison waktu kehidupan tidak hanya mencakup kehidupan dunia melainkan hingga akhirat. Oleh karena itu, kelangsungan keturunan dan keberlanjutan dari generasi ke generasi harus diperhatikan. Ini merupakan suatu kebutuhan yang amat penting bagi eksistensi manusia.³²

e. Peran Harta (*mal*)

Harta material (*mal*) sangat dibutuhkan, baik untuk kehidupan duniawi maupun ibadah. Manusia membutuhkan harta untuk pemenuhan kebutuhan makanan, minuman, pakaian, rumah, kendaraan, perhiasaan sekedarnya dan berbagai kebutuhan lainnya untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Selain itu, hampir semua ibadah memerlukan harta, misalnya zakat, infak, sedekah, haji, menuntut ilmu, membangun sarana-sarana peribadatan, dan lain-lain. Tanpa harta yang memadai kehidupan akan menjadi susah, termasuk menjalankan ibadah.³³

Harta benda ditempatkan pada urutan terakhir. Hal ini tidak disebabkan ia adalah perkara yang tidak penting, namun karena harta itu tidak dengan sendirinya membantu perwujudan kesejahteraan bagi semua

³²*Ibid.*

³³P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam.*, h. 7.

orang dalam dalam satu pola yang adil kecuali jika faktor manusia itu sendiri telah direformasi untuk menjamin beroperasinya pasar secara *fair*. Jika harta benda ditempatkan pada urutan pertama dan menjadi tujuan itu sendiri, akan menimbulkan ketidakadilan yang kian buruk, ketidakseimbangan, dan eksese-eksese lain yang pada gilirannya akan mengurangi kesejahteraan mayoritas generasi sekarang maupun yang akan datang. Oleh karena itu, keimanan dan harta benda, keduanya memang diperlukan bagi kehidupan manusia, tetapi imanlah yang membantu menyuntikkan suatu disiplin dan makna dalam memperoleh penghidupan dan melakukan pembelanjaan sehingga memungkinkan harta itu memenuhi tujuannya secara lebih efektif.³⁴

Tiga tujuan yang berada di tengah (diri manusia, akal dan keturunan) berhubungan dengan manusia itu sendiri, di mana kebahagiaannya merupakan tujuan utama syariat. Ketiga persoalan ini meliputi kebutuhan-kebutuhan intelektual dan psikologis, moral dan fisik generasi sekarang dan yang akan datang. Arah tegas yang diberikan oleh keimanan dan komitmen moral kepada pemenuhan semua kebutuhan.³⁵

Oleh karena itu, dengan memasukkan unsur diri manusia, akal, dan keturunan dalam model kita ini, akan memungkinkan terciptanya suatu pemenuhan yang seimbang terhadap semua kebutuhan hidup manusia. Ia juga dapat membantu menganalisis variabel-variabel ekonomi yang penting seperti konsumsi, tabungan, investasi, kerja, produksi, alokasi dan distribusi kekayaan dalam suatu cara yang membantu mewujudkan kesejahteraan untuk semua.³⁶

Berdasarkan uraian teori *Maqashid Asy Syariah* dan *masalah* maka teori tersebut untuk menganalisis dan menjelaskan *maqasid*

³⁴M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam.*, h. 105.

³⁵*Ibid.*, h. 106.

³⁶*Ibid.*

ekonomi syariah. Teori ini sangat tepat jika digunakan untuk menganalisis tujuan dan hakikat dari pusat halal, serta menganalisis pembangunan hukum berbasis syariah. Teori ini akan mengkaji keberlakuan pengembangan pusat halal di Indonesia dalam konteks pembangunan hukum yang sesuai dengan tujuan syariat Islam.

C. Kerangka Konseptual

1. Pengembangan

Pengembangan berasal dari kata dasar kembang yang berarti menjadi bertambah sempurna. Kemudian mendapat imbuhan pe- dan -an sehingga menjadi pengembangan yang artinya proses, cara atau perbuatan mengembangkan. Jadi pengembangan di sini adalah usaha sadar yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan agar lebih sempurna dari pada sebelumnya. Dalam kamus bahasa Indonesia pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan.³⁷

Sedangkan menurut Tessmer dan Richey dalam bukunya Alim bahwa pengembangan memusatkan perhatiannya tidak hanya pada analisis kebutuhan, tetapi juga isu-isu luas tentang analisis awal-akhir, seperti analisis kontekstual. Pengembangan bertujuan untuk menghasilkan produk berdasarkan temuan-temuan uji lapangan.³⁸

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2002 Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru. Pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Penelitian ini mengikuti suatu langkah-langkah secara siklus. Langkah penelitian atau proses pengembangan ini

³⁷Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, h. 1120.

³⁸Alim Sumarno, *Penelitian Kausalitas Komparatif*, Surabaya: elearning unesa, 2012, h. 74.

terdiri atas kajian tentang temuan penelitian produk yang akan dikembangkan, mengembangkan produk berdasarkan temuan-temuan tersebut, melakukan uji coba lapangan sesuai dengan latar di mana produk tersebut akan dipakai, dan melakukan revisi terhadap hasil uji lapangan.³⁹

Penelitian pengembangan adalah suatu atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat dipertanggung jawabkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menghasilkan produk baru melalui pengembangan. Berdasarkan pengertian pengembangan yang telah diuraikan yang dimaksud dengan pengembangan adalah suatu proses untuk menjadikan potensi yang ada menjadi sesuatu yang lebih baik dan berguna sedangkan penelitian dan pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk atau menyempurnakan produk yang telah ada menjadi produk yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pengembangan pada dasarnya adalah hal, usaha, atau cara untuk mengembangkan sesuatu kearah yang lebih baik. Menurut Sujadi pengembangan merupakan proses atau langkah untuk mengembangkan suatu produk baru, untuk menyempurnakan produk yang sudah ada, yang bisa dipertanggung jawabkan. Dalam pengembangan pariwisata regulasi sangatlah penting dalam rangka pengaturan pengembangan pariwisata agar tidak berbenturan karena adanya konflik kepentingan tetapi mestinya sebaliknya berjalan saling menunjang. Sektor pariwisata merupakan sektor yang diharapkan akan dapat menjadi penghasil devisa nomor satu. Sehingga pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata perlu ditingkatkan melalui kebijakan-kebijakan pengembangan kepariwisataan. Pada dasarnya tujuan utama dari pengembangan kepariwisataan adalah untuk meningkatkan

³⁹Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2013, h. 222-223.

nilai ekonomi. Menurut Undang-undang No 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, pasal 4, tujuan pengembangan pariwisata adalah :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- c. Menghapus kemiskinan
- d. Mengatasi pengangguran
- e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya
- f. Memajukan kebudayaan
- g. Mengangkat citra bangsa
- h. Memupuk rasa cinta tanah air
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa
- j. Mempererat persahabatan antarbangsa

Pariwisata dipandang sebagai sumberdaya ekonomi yang potensial. Pariwisata dapat menjadi alat penarik investasi di daerah yang memiliki potensi sangat besar dan memiliki banyak keunggulan, Diantarannya :

- a. Pengembangan pariwisata merupakan hal yang dapat dilaksanakan dengan waktu yang paling cepat
- b. Pengembangan pariwisata dapat dilaksanakan dengan metode yang paling mudah dan sederhana
- c. Pengembangan pariwisata akan melibatkan masyarakat, sehingga banyak pihak dapat menikmati manfaatnya
- d. Pengembangan pariwisata tidak hanya memerlukan sumberdaya manusia yang berkompotensi tinggi, tetapi juga berkompotensi menengah dan rendah
- e. Pengembangan pariwisata dapat mendorong pelestarian lingkungan alam, budaya dan sosial masyarakat
- f. Kendala pengembangan pariwisata relatif lebih sedikit jika dibandingkan dengan sektor lainnya

- g. Pengembangan pariwisata menawarkan sektor tercepat untuk membangun industri pendukung

Pengembangan pariwisata suatu daerah akan membawa perubahan pada daerah tersebut. Perubahan yang dimaksud dapat bernilai positif jika pengembangan pariwisata dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang benar, yakni melalui perencanaan yang cermat dan matang supaya sesuai dengan kondisi setempat. Namun demikian jika pelaksanaannya tidak direncanakan dengan baik maka justru akan membawa kerugian atau berdampak negatif bagi stakeholder maupun daerah tempat pariwisata berkembang. Menurut Oka A. Yoety menyatakan bahwa ada sembilan prinsip yang perlu diikuti oleh pengembangan pariwisata sebagai pedoman dasar untuk menyusun rencana pariwisata yaitu :

- a. Perencanaan pengembangan pariwisata merupakan suatu kesatuan dengan pembangunan regional maupun nasional dari pembangunan perekonomian negara.
- b. Perencanaan pengembangan pariwisata perlu menggunakan pendekatan terpadu dengan sektor-sektor lainnya yang berkaitan dengan bidang pariwisata.
- c. Perencanaan pengembangan pariwisata perlu dibawah koordinasi perencanaan fisik daerah secara keseluruhan.
- d. Perencanaan pengembangan pariwisata perlu didasarkan pada studi yang khusus dibuat secara khusus untuk pengembangan pariwisata dengan memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan alam dan budaya disekitar wilayah pengembangan.
- e. Perencanaan fisik harus didasarkan pada penelitian yang sesuai dengan lingkungan alam sekitar dengan memperhatikan faktor geografis yang lebih luas tidak hanya dari segi administrasi saja.

- f. Perencanaan dan penelitian yang dilakukan harus memperhatikan masalah kelestarian ekologi agar pariwisata dapat berlangsung secara berkelanjutan.
- g. Perencanaan pengembangan pariwisata harus memperhatikan dampak sosial supaya pengembangan pariwisata tidak mendapatkan resistensi karena konflik sosial yang mungkin timbul.
- h. Pada daerah perkotaan dan daerah industri, perlu direncanakan fasilitas hiburan yang disebut pre-urban.
- i. Perencanaan pengembangan pariwisata salah satu tujuannya adalah untuk memberikan kesejahteraan masyarakat.⁴⁰

2. Pariwisata

a. Pengertian

Pariwisata berasal dari bahasa sansekerta, sesungguhnya bukanlah berarti “tourisme” (bahasa belanda) atau “tourism” (bahasa inggris). Kata pariwisata menurut pengertian ini, sinonim dengan pengertian “tour”. Pendapat ini berdasarkan pemikiran bahwa kata pariwisata terdiri dari dua suku kata yaitu pari dan wisata. Pari berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap. Wisata berarti perjalanan, berpergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata trave. Maka dari itu pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputat-putar, dari suatu tempat ke tempat lain.

Dalam arti luas pariwisata adalah kegiatan rekreasi diluar domisili untuk melepaskan diri dari pekerjaan rutin atau mencari suasana lain. Sebagai suatu aktifitas, pariwisata telah menjadi bagian penting dari kebutuhan dasar masyarakat maju dan sebagian kecil masyarakat negara berkembang. Pada hakikatnya berpariwisata adalah proses kepergian

⁴⁰Wardiyanto, *Perencanaan Pengembangan Pariwisata*, Bandung : Lubuk Agung, 2011, h. 9.

sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain diluar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan

Pada hakikatnya berpariwisata adalah proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain diluar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti karena sekedar ingin tahu, menambah pegalaman ataupun untuk belajar.² Pariwisata yang berasal dari kata wisata menurut Republik Indonesia No. 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan mendefinisikan wisata sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang mengunjungi tempat tertentu dengan tujuan rekreasi, mengembangkan pribadi, atau mempelajari daya tarik wisata yang dikunjungi.³ Pariwisata merupakan salah satu sektor industri yang mampu menghasilkan perubahan ekonomi yang cepat dalam menyediakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan penghasilan pemerintah dan masyarakat. Standar hidup serta meningkatkan sektor-sektor produktifitas lainnya, untuk itu pariwisata harus disimpulkan dari cara penggunaan istilah tersebut. Menurut Mill and Morrison, pariwisata merupakan sistem dari berbagai elemen yang tersusun seperti sasrang laba-laba: “like a spider’s web-touch one part of it and reverberations will be felt throughout.

Fannel, menjelaskan bahwa pariwisata merupakan suatu sistem yang dapat dipandang sebagai : “... the interrelated system that includes tourists and the associated servise that are provided and utilised (facilities, attractions, transportation, and accommodation) toaid in their movement”. Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah suatu perjalanan dari suatu tempat yang lain yang

dilakukan oleh individu maupun kelompok yang bersifat sementara atau tidak untuk tinggal ditempat yang dikunjungi.⁴¹

b. Jenis Pariwisata

Menurut Oka A. Yoeti jenis pariwisata diklasifikasikan menurut letak geografis, pengaruhnya terhadap neraca pembayaran, alasan atau tujuan perjalanan, saat atau waktu berkunjung dan menurut obyeknya. Jenis pariwisata tersebut adalah sebagai berikut :⁴²

Menurut letak geografis di mana kegiatan pariwisata berkembang

1) Pariwisata Lokal (Local Tourism)

Yaitu pariwisata setempat yang mempunyai ruang lingkup relatif sempit dan terbatas dalam tempat-tempat tertentu saja, misalnya kepariwisataan Bandung, Jakarta saja dan sebagainya.

2) Pariwisata Regional (Regional Tourism)

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang di suatu tempat atau ruang lingkup yang lebih luas dari pariwisata lokal, misalnya kepariwisataan Sumatera Utara, Bali dan sebagainya.

3) Pariwisata Nasional (National Tourism)

Yaitu pariwisata yang berkembang dalam suatu negara.

4) Pariwisata regional-internasional

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang di suatu wilayah internasional yang terbatas, tetapi melewati batas-batas lebih dari dua negara dalam wilayah tersebut, misalnya kepariwisataan ASEAN, Timur Tengah dan sebagainya.

5) Kepariwisata dunia (international tourism)

⁴¹Ismayanti, *Pengantar Pariwisata*, Jakarta: PT Gramedia Widisarana, 2010, h. 1

⁴²Unggul Priyadi, *Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2016, h 29.

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang di seluruh dunia, termasuk di dalamnya regional-international tourism dan national tourism.

Menurut pengaruhnya terhadap neraca pembayaran

1) In Tourism atau Pariwisata Aktif

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala masuknya wisatawan asing ke suatu negara tertentu sehingga dapat menambah devisa bagi negara yang dikunjungi dan memperkuat posisi neraca pembayaran negara.

2) Out-going Tourism atau Pariwisata Pasif

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala keluarnya warga negara sendiri ke luar negeri sebagai wisatawan. Hal ini akan merugikan negara asal wisatawan karena uang yang seharusnya dibelanjakan di dalam negeri dibawa ke luar negeri.

Menurut alasan atau tujuan perjalanan

1) Business Tourism

Yaitu jenis pariwisata dimana pengunjungnya datang untuk tujuan dinas, usaha dagang atau yang berhubungan dengan pekerjaannya, kongres, seminar, konvensi, simposium, musyawarah kerja.

2) Vocation Tourism

Yaitu jenis pariwisata dimana orang-orang yang melakukan perjalanan wisata terdiri dari orang-orang yang sedang berlibur atau cuti.

3) Educational Tourism

Yaitu jenis pariwisata dimana pengunjung atau orang-orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan studi atau mempelajari suatu bidang ilmu pengetahuan.

Menurut saat atau waktu berkunjung

- 1) Seasonal Tourism Yaitu jenis pariwisata yang kegiatannya berlangsung pada musim-musim tertentu.
- 2) Occasional Tourism Yaitu jenis pariwisata dimana perjalanan wisatanya dihubungkan dengan kejadian (occasion) maupun suatu even seperti sekaten di Yogyakarta, Galungan dan Kuningan di Bali dan sebagainya.

Menurut obyeknya

- 1) Cultural Tourism

Yaitu jenis pariwisata dimana motivasi orang-orang untuk melakukan perjalanan disebabkan oleh adanya daya tarik dari seni budaya suatu tempat atau daerah.

- 2) Recuperational Tourism

Disebut juga pariwisata kesehatan. Tujuan dari perjalanan ini adalah untuk menyembuhkan suatu penyakit seperti mandi di sumber air panas.

- 3) Commercial Tourism

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang dikaitkan dengan kegiatan perdagangan nasional atau internasional, misalnya expo, fair, eksibisi dan sebagainya.

- 4) Sport Tourism

Yaitu perjalanan orang-orang yang bertujuan untuk menyaksikan suatu pesta olah raga di suatu tempat atau negara tertentu.

- 5) Political Tourism

Yaitu suatu perjalanan yang bertujuan untuk menyaksikan suatu peristiwa yang berhubungan dengan suatu negara seperti ulang tahun atau peringatan hari tertentu.

6) Social Tourism

Jenis pariwisata ini tidak menekankan untuk mencari keuntungan seperti studi tour, piknik dan sebagainya.

7) Religion Tourism

Yaitu kegiatan pariwisata yang bertujuan untuk menyaksikan upacara keagamaan.

c. Bentuk Pariwisata

Menurut Salah Wahab, dalam buku “Tourism Management” membagi bentuk pariwisata sesuai motivasi perjalanan yang dilakukan serta objek yang dikunjungi sebagai berikut :⁴³

Menurut jumlah orang yang melakukan perjalanan :

1) Individual Tourism

Disini yang melakukan perjalanan wisata adalah seorang wisatawan keluarga yang melakukan perjalanan secara bersama.

2) Group Tourism

Yaitu jenis pariwisata dimana yang melakukan perjalanan wisata dari banyak orang yang bergabung dalam satu rombongan (grup) yang biasa dikelola oleh sekolah, organisasi atau satu Tour Operator/Tour Agent. Jumlahnya bervariasi, 15-20 orang.

Menurut maksud dari perjalanan yang dilakukan :

1) Recreational Tourism atau Leisure Tourism

Yaitu jenis pariwisata yang maksud perjalanannya untuk mengembalikan kekuatan fisik dan mental setelah melakukan pekerjaan/tugas rutin sehari-hari.

2) Cultural Tourism

Yaitu jenis pariwisata yang maksud dan tujuan perjalanannya dalam rangka memperkaya informasi dan menambah pengetahuan

⁴³Sedarmayanti, Gumelar S.Sastrayuda, Lia Afiza, *Pembangunan & Pengembangan Pariwisata*, Bandung: PTRefika Aditama, 2018, h. 16.

tentang negara lain, disamping ingin dapat kepuasan, hiburan dari hasil kebudayaan suatu bangsa, seperti tarian tradisional, tata cara hidup masyarakat setempat.

3) Health Tourism

Yaitu jenis pariwisata yang tujuan perjalanannya dalam rangka pengobatan atau memulihkan kesehatan di suatu negara/ tempat, seperti : hot spring, mud-bath, treatment by mineral water, treatment by hot sand dan lain-lain.

4) Sport Tourism

Yaitu jenis pariwisata yang bertujuan memenuhi kepuasan untuk melakukan kegiatan olah raga yang disenangi, seperti : fishing, hunting, deep-sea diving, skiing, hiking, boating, dan olah raga lainnya.

5) Conference Tourism

Di Indonesia dikenal dengan istilah Pariwisata Konvensi yaitu perjalanan yang dilakukan untuk suatu pertemuan, konperensi, convention, di mana pesertanya juga memerlukan fasilitas kepariwisataan seperti : transportasi, akomodasi, pre dan post conference tour serta pembelian souvenir.

Menurut alat pengangkutan yang digunakan:

1) Land Tourism

Yaitu jenis pariwisata yang dalam kegiatannya menggunakan kendaraan bus, taxi, kereta api, dan sejenisnya.

2) Sea River Tourism

Yaitu jenis pariwisata yang dalam kegiatannya menggunakan kapal laut, perahu, dan sejenisnya untuk pesiar.

3) Air Tourism

Yaitu jenis pariwisata yang dalam kegiatannya menggunakan pengangkutan udara dari dan ke daerah tujuan wisata yang hendak dikunjungi.

Menurut letak geografis:

1) National Domestic Tourism

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang dikembangkan dalam wilayah suatu negara, dimana para pesertanya tidak hanya terdiri dari wargan negara sendiri tetapi juga orang asing yang berdiam di negara tersebut.

2) Regional Tourism

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang dikembangkan dalam suatu wilayah tertentu, dapat regional dalam lingkungan nasional dan dapat pula regional dalam ruang lingkup internasional.

3) Internatonal Tourism

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang terdapat atau dikembangkan di banyak negara dan dalam hal ini sama dengan pariwisata dunia (World Tourism).

Menurut umur yang melakukan perjalanan :

1) Youth Tourism

Yaitu jenis pariwisata yang dikembangkan bagi para remaja yang suka melakukan perjalanan yang relatif murah.

2) Abdur Tourism

Yaitu kegiatan pariwisata yang diikuti oleh orang-orang usia lanjut, dan biasanya adalah pensiunan.

Menurut jenis kelamin :

1) Masculine Tourism

Yaitu jenis pariwisata yang kegiatannya hanya dilakukan oleh pria. Misalnya, safari hunting adventure.

2) Feminine Tourism

Yaitu jenis pariwisata yang hanya dilakukan oleh kaum wanita saja. Misalnya , rombongan untuk menyaksikan demonstrasi masak, kecantikan, menghias, dan lain-lain.

Menurut harga dan tingkat sosial :

1) Deluxe Tourism

Yaitu perjalanan wisata yang menggunakan fasilitas standar mewah, baik alat angkutan, hotel maupun atraksinya.

2) Middle Class Tourism

Yaitu jenis perjalanan wisata yang diperuntukan bagi mereka yang menginginkan fasilitas dengan harga yang tidak terlalu mahal, tetapi tidak terlalu jelek pelayannanya.

3) Social Tourism

Yaitu perjalanan wisata yang penyelenggaraannya dilakukan secara bersama dengan biaya yang diperhitungkan semurah mungkin dengan fasilitas yang cukup memadai dalam perjalanan.⁴⁴

d. Daerah Tujuan Wisata

Daerah tujuan wisata atau yang sekarang ini disebut dengan destinasi wisata, merupakan daerah yang memiliki obyek-obyek wisata yang di dukung prasarana pariwisata dan masyarakat, daerah yang berdasarkan kesiapan prasarana dan sarana dinyatakan siap menerima kunjungan wisatawan. Untuk menjadi daerah tujuan wisata tentu banyak hal yang perlu disiapkan pemerintah daerah antara lain:

⁴⁴*Ibid.*, h.19.

- 1) Melakukan investasi obyek dan daya tarik wisata di daerahnya yang dapat dijadikan sasaran kunjungan wisata
- 2) Menyiapkan jalan-jalan menuju obyek dan daya tarik wisata
- 3) Menyiapkan masyarakat untuk menerima wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus) dengan menampilkan keramahan, rasa aman, rasa nyaman, dan bersahabat.

Unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pembangunan dan pengembangan meliputi 5 unsur yaitu:

- 1) obyek dan daya tarik wisata

daya tarik wisata yang juga disebut objek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Umumnya daya tarik suatu objek wisata berdasarkan pada adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah nyaman dan bersih. Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya. Adanya ciri khusus/spesifikasi yang bersifat langka. Objek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara adat nilai luhur yang terkandung dalam suatu objek buah karya manusia pada masa lampau.

- 2) Prasarana pariwisata

Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air bersih, telekomunikasi, terminal, jembatan, dan lain sebagainya, untuk kesiapan objek-objek wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan di

daerah tujuan wisata, prasarana wisata tersebut perlu dibangun dengan sesuai dengan lokasi dan kondisi objek wisata yang bersangkutan.

3) Sarana wisata

Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata ialah hotel, biro perjalanan, alat transportasi, restoran dan rumah makan serta sarana pendukung lainnya. Tak semua objek wisata memerlukan sarana yang sama atau lengkap sesuai dengan kebutuhan wisatawan.

4) Tata laksana /Infrastruktur

Infrastruktur adalah situasi yang mendukung fungsi sarana dan prasarana wisata, baik yang berupa sistem pengaturan maupun bangunan fisik di atas permukaan tanah dan dibawah tanah seperti :

- a) Sistem pengairan, distribusi air bersih, sistem pembuangan air limbah yang membantu sarana perhotelan/restoran.
- b) Sumber listrik dan energi serta jaringan distribusinya yang merupakan bagian vital bagi terselenggaranya penyediaan sarana wisata yang memadai.
- c) Sistem jalur angkutan dan terminal yang memadai dan lancar akan memudahkan wisatawan untuk mengunjungi objek-objek wisata
- d) Sistem komunikasi yang mudah
- e) Sistem keamanan atau pengawasan yang memberikan kemudahan diberbagai sektor bagi para wisatawan.

5) Masyarakat (lingkungan)

Daerah dan tujuan wisata yang memiliki berbagai objek dan daya tarik akan mengundang kehadiran wisatawan. keberadaan masyarakat disekitar objek wisatalah yang akan menyambut kehadiran wisatawan

tersebut dan sekaligus akan memberikan layanan yang diperlukan oleh para wisatawan.

e. Komponen Produk Pariwisata

Terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk produk pariwisata dan untuk semakin melengkapi kegunaan produk pariwisata tersebut bagi wisatawan, tidak terlepas dari peran manusianya yang bersifat ramah tamah maka komponen pariwisata menjadi 3A plus H yaitu :⁴⁵

- 1) Daya Tarik Wisata (Attractions) Setiap destinasi pariwisata memiliki daya tarik berbeda-beda sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ada dua jenis daya tarik wisata yaitu
 - a) Daya tarik wisata alami, segala bentuk daya tarik yang dimiliki alam
 - b) Daya tarik wisata buatan manusia, meliputi daya tarik wisata budaya seperti tarian, upacara ritual dan daya tarik wisata yang merupakan hasil karya cipta misalnya lukisan , seni pahat.
 - c) Fasilitas dan Pelayanan (Amenities) Komponen fasilitas dan pelayanan perjalanan biasanya terdiri dari unsur alat transportasi, fasilitas akomodasi, fasilitas makan dan minum, dan fasilitas penunjang lainnya yang bersifat spesifik dan disesuaikan dengan kebutuhan perjalanan.
 - d) Kemudahan untuk mencapai destinasi (Accessibilities) Faktor yang tidak kalah penting dalam mempengaruhi kepuasan wisatawan, yaitu faktor aksesibilitas, yang berarti kemudahan yang tersedia untuk mencapai destinasi wisata.
 - e) Keramahan yang ditawarkan (Hospitality) Destinasi wisata dapat menyebabkan munculnya perasaan wisatawan terhadap

⁴⁵Sedarmayanti, Gumelar S.Sastrayuda, Lia Afiza, *Pembangunan & Pengembangan Pariwisata*, Bandung: PTRefika Aditama, 2018, h 168-169.

kebutuhan yang berkaitan dengan keramahtamahan melalui seseorang atau sesuatu.

3. Konsep Pariwisata Halal

a. Pengertian

Munculnya istilah *halal tourism* atau pariwisata halal pada awalnya suatu kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan atas dasar untuk menumbuhkan motivasi rasa atau nilai religi yang ada dalam dirinya dengan mengunjungi tempat-tempat ibadah, tempat pemakaman, atau tempat bersejarah yang memiliki nilai-nilai religi sesuatu dengan agama yang dianut. Pada awalnya pariwisata ini disebut juga dengan wisata religi. Wisata religi ini pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations World Tourism Organization (UNWTO)* pada tahun 1967 saat melaksanakan pertemuan bertemakan “*Tourism and Religions: A Contribution to the Dialogue of Cultures, Religions and Civilizations*”. Wisata religi ini kemudian mengalami perkembangan karena segmen dari wisata ini tidak hanya sebatas agama tertentu. Nilai yang lebih universal dan memiliki manfaat bagi masyarakat, seperti nilai edukasi, dan nilai kearifan lokal juga tidak ditinggalkan. Sedangkan persepsi publik tentang wisata halal adalah kegiatan yang dilakukan wisatawan untuk mengunjungi masjid maupun kuburan, padahal wisata halal sendiri mencakup wisata budaya, wisata alam, maupun wisata buatan yang dirangkai dengan prinsip dan nilai Islam. Ada istilah lain yang juga digunakan oleh beberapa negara dalam menerapkan wisata halal, seperti *Halal Travel*, *Halal lifestyle*, *Islamic Tourism*, *Halal Friendly Tourism Destination*, atau *Muslim-Friendly Travel Destination*.⁴⁶

Pariwisata syariah dalam perspektif masyarakat pada umumnya berupa wisata ziarah makan ulama, masjid-masjid, peninggalan-peninggalan sejarah, umrah, haji dan lain-lain. Sebenarnya pariwisata syariah bukan hanya wisata

⁴⁶Fernan Rahadi, lihat <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/03/16/omwaqj291-apakah-sesungguhnya-pariwisata-syariah>

ziarah melainkan pariwisata adalah trend baru pariwisata dunia yang dapat berupa wisata alam, wisata budaya, maupun wisata buatan yang keseluruhannya dibingkai dalam nilai-nilai Islam. Sejalan dengan tujuan dijalankannya syariah, yaitu memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan terhadap keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda.

Istilah lain bagi wisata halal disebutkan pula oleh Jaelani, sebagai *Islamic Tourism* yaitu perjalanan wisatawan muslim ke suatu tempat dengan motivasi untuk meningkatkan keimanan dan dalam perjalanan tersebut selalu melaksanakan prinsip-prinsip Islam. Untuk lebih jelasnya, Tabel 1 di bawah ini adalah perbandingan jenis pariwisata konvensional, religi, dan halal:

Tabel 1 –
Perbedaan Wisata Halal, Religi, Konvensional⁴⁷

No	Unsur	Konvensional	Religi	Halal
1	Objek	Alam, warisan budaya, kuliner	Peninggalan sejarah, tempat ibadah	Semuanya
2	Tujuan	Hiburan	Menambah rasa spiritual	Meningkatkan rasa religiusitas dengan menghibur
3	Target	Menyentuh kepuasan dan kesenangan yang berdimensi nafsu, untuk menghibur semata	Aspek spiritual menenangkan jiwa, mencari ketentraman batin semata	Memenuhi keinginan dan kesenangan serta Menumbuhkan kesadaran beragama
4	Pemandu	Paham dan menguasai	Mengetahui dan	Membangkitkan

⁴⁷S. Riyanto, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, Jakarta: Buku Republika, 2012, h.56

	wisata	objek wisata agar wisatawan tertarik	paham sejarah tentang lokasi dan tokoh objek wisata	spirit religi wisatawan dan menjelaskan fungsi dan peran kebahagiaan rohani dalam konteks Islam
5	Fasilitas ibadah	Hanya perlengkapan	Hanya perlengkapan	Menjadi satu bagian dengan destinasi wisata, serta ritual dalam beribadah menjadi paket hiburan
6	Kuliner	Umum	Umum	Umum dan sertifikasi halal
7	Relasi dengan masyarakat di sekitar destinasi wisata	Komplementer dan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan	Komplementer dan hanya untuk mendapatkan keuntungan	Terintegrasi, interasksi berdasarkan prinsip Islam
8	Rencana Perjalanan	Tidak memperhatikan waktu	Peduli dengan waktu	Waktu perjalanan diperhatikan

Adapun yang menjadi penting bagi wisatawan muslim adalah kebutuhan privasi sebagai seorang muslim seperti disediakan tempat renang, fasilitas olah raga, serta tempat wisata yang dapat memberikan batasan antara laki-laki dan perempuan. Beberapa hal yang penting diperhatikan dalam layanan wisata halal, yaitu:

- 1) Harus memenuhi setidaknya dua aspek seperti fasilitas sholat dan makanan halal,

- 2) terpenuhi fasilitas toilet dengan air yang baik dan ada layanan maupun fasilitas saat bulan puasa,
- 3) selain itu dianjurkan untuk tidak ada aktivitas minuman beralkohol serta tentunya layanan rekreasi yang baik.⁴⁸

Namun, fasilitas ini juga diperuntukkan bagi wisatawan secara umum (bukan hanya diperuntukkan pada wisatawan muslim saja), karena segmen ini secara universal mencakup wisata budaya, alam, dan tradisi. Yang menjadi karakter utama dalam pariwisata halal adalah pengemasan nilai-nilai dan prinsip Islam yang dapat dinikmati semua wisatawan dari berbagai latar belakang agama dengan memenuhi kebutuhan dasar wisatawan muslim, seperti fasilitas ibadah yang mudah diakses, produk makanan maupun minuman dengan jaminan halal, serta tempat tinggal yang ramah terhadap wisatawan muslim seperti hotel syariah.⁴⁹

b. Kriteria Pariwisata Syariah

Kriteria umum pariwisata syariah menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta BPH DSN MUI, yaitu:

- 1) Berorientasi pada kemaslahatan umum,
- 2) Berorientasi pada pencerahan, penyegaran dan ketenangan,
- 3) Menghindari kemusyrikan dan khurafat,
- 4) Menghindari maksiat seperti zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi, menjaga perilaku, etika, dan nilai luhur kemanusiaan seperti menghindari perilaku hedonis dan asusila,
- 5) Menjaga amanah, keamanan, dan kenyamanan,
- 6) Bersifat universal dan inklusif,
- 7) Menjaga kelestarian lingkungan, dan
- 8) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal

⁴⁸Mastercard & Crescentrating, *Global Muslim Travel Index 2018*, GMTI, April 2018, h. 78.

⁴⁹Alwafi Ridho Subarkah, *DIPLOMASI PARIWISATA HALAL NUSA TENGGARA BARAT*, Intermestic: Journal of International Studies, Volume 2, No. 2, Mei 2018, h. 194.

Jika kriteria umum di atas diaplikasikan pada komponen usaha, profesi, dan daya tarik wisata maka dari panduan umum menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta BPH DSN MUI, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Daya Tarik/Objek Wisata Syariah Dari sisi objek wisata, hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah:
 - a) Objek wisata meliputi wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan
 - b) Tersedia fasilitas ibadah yang layak dan suci
 - c) Tersedia makanan dan minuman halal
 - d) Pertunjukan seni budaya serta atraksi yang tidak bertentangan dengan kriteria umum pariwisata syariah
 - e) Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.
- 2) Akomodasi Pariwisata Syariah Objek wisata syariah harus memiliki akomodasi penginapan yang sesuai dengan standar syariah. tentu saja yang terbaik adalah apabila sudah ada hotel atau losmen syariah yang sudah mendapat sertifikat dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Namun, mengingat saat ini masih sedikit sekali hotel yang mendapat sertifikat syariah dari DSN-MUI maka paling tidak hotel atau penginapan yang tersedia harus memenuhi halhal berikut:
 - a) Tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci
 - b) Tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah
 - c) Tersedia makanan dan minuman halal
 - d) Fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis
 - e) Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.

3) Usaha penyedia makanan dan minuman

Seluruh restoran, kafe, dan jasa boga di objek wisata syariah harus terjamin kehalalan makanan yang disajikannya, sejak dari bahan baku hingga proses penyediaan bahan baku, dan proses memasaknya. Cara yang paling baik adalah restoran, kafe, maupun jasa boga tersebut sudah mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM MUI. Kalau cara tersebut belum dapat dilakukan mengingat berbagai kendala maka minimal hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

- a) Terjamin kehalalan makanan-minuman dengan sertifikat halal MUI
 - b) Ada jaminan halal dari MUI setempat, Tokoh muslim atau pihak terpercaya, dengan memenuhi ketentuan yang akan ditetapkan selanjutnya, apabila poin a belum terpenuhi
 - c) Terjaga lingkungan yang sehat dan bersih.
- 4) Spa, sauna, dan massage Terdapat sejumlah hal khusus yang harus diperhatikan bagi fasilitas spa bila hendak melayani wisatawan dengan konsep wisata syariah ini, di antaranya:
- a) Terapis pria untuk pelanggan pria dan terapis wanita untuk wanita
 - b) Tidak mengandung unsur pornoaksi dan pornografi
 - c) Menggunakan bahan yang halal dan tidak terkontaminasi babi dan produk turunannya
 - d) Tersedia sarana yang memudahkan untuk beribadah.
- 5) Biro perjalanan wisata syariah
- Biro perjalanan wisata tidak perlu khusus memiliki kualitas syariah. Namun yang penting biro perjalanan tersebut:
- a) Menyelenggarakan paket perjalanan/wisata yang sesuai dengan kriteria umum pariwisata syariah,

- b) Memiliki daftar akomodasi yang sesuai dengan panduan umum akomodasi pariwisata syariah,
 - c) Memiliki daftar usaha penyedia makanan dan minuman yang sesuai dengan panduan umum usaha penyedia makanan dan minuman pariwisata syariah.
- 6) Pramuwisata (pemandu wisata) syariah
- Pramuwisata syariah memegang peran sangat penting dalam penerapan prinsip syariah di dunia wisata, karena ditanganntyalah eksekusi berbagai aturan syariah yang diterapkan dalam pariwisata syariah. Karena posisinya sebagai pemimpin perjalanan wisata, keimanan seorang pramuwisata haruslah seorang muslim atau muslimah. Di samping itu ia harus memenuhi syarat berikut:
- a) Mendalami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas
 - b) Berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur, dan bertanggung jawab
 - c) Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan etika Islam
 - d) Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku.⁵⁰

Menurut fatwa DSN-MUI tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata terkait ketentuan destinasi wisata :

- 1) Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk :
 - a) Mewujudkan kemaslahatan umum
 - b) Pencerahan, penyegaran dan penenangan
 - c) Memelihara amanah, keamanan, dan kenyamanan
 - d) Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif
 - e) Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan

⁵⁰Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, Jakarta:Republika, 2012, h. 55-59.

- f) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah
- 2) Destinasi wisata wajib memiliki :
 - a) Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah
 - b) Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI
- 3) Destinasi wisata wajib terhindar dari:
 - a) Kemusyrikan dan khurafat
 - b) Maksiat, zina, porografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi
 - c) Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip syariah.⁵¹

4. Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional, yang melibatkan kepada perubahan besar, baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan wilayah (regional) merupakan fungsi dari potensi sumber daya alam, tenaga kerja dan sumber daya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan

⁵¹Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI(X) 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata

(kewiraswastaan), kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas.⁵²

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan.⁵³

Setiap upaya pembangunan daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah dengan menggunakan segenap potensi yang dimilikinya baru. Perbedaan kondisi daerah membawa implikasi bagi corak pembangunan yang akan diterapkan. Peniruan terhadap pola kebijakan yang berhasil pada suatu daerah, belum tentu memberikan manfaat yang sama bagi daerah lainnya. Dengan demikian pola kebijakan pembangunan yang diambil oleh suatu daerah harus disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu penelitian yang mendalam tentang keadaan dan potensi tiap daerah harus dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi yang berguna bagi penentuan arah perencanaan pembangunan daerah yang bersangkutan. Masalah pokok pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan

⁵²Adisasmita, Rahardjo, *"Pengembangan Wilayah Konsep dan Teori"*, Jakarta:Penerbit Graha Ilmu, 2008, h.13.

⁵³Lincoln Arsyad, *"Ekonomi Pembangunan"*, Yogyakarta: BPFE, 1999, Edisi IV, h. 107.

dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal. Orientasi ini mengarah pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi

Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan secara seimbang perencanaan yang teliti mengenai penggunaan sumberdaya-sumberdaya yang ada. Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah, suatu daerah dapat dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit ekonomi yang didalamnya terdapat berbagai unsur yang berinteraksi satu dengan yang lain. Beberapa teori pembangunan daerah antara lain:

- a) Teori Ekonomi Neo Klasik, teori ini memberikan dua konsep pokok dalam pembangunan daerah yaitu keseimbangan dan mobilitas faktor-faktor produksi. Artinya sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiah jika modalnya bisa mengalir tanpa restriksi atau pembatasan. Biasanya modal akan mengalir dari daerah yang mempunyai upah yang tinggi ke daerah dengan upah yang rendah.
- b) Teori Basis Ekonomi, teori ini menyatakan bahwa faktor utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal dengan orientasi ekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan menciptakan peluang kerja. Dalam teori ini dijelaskan bahwa perekonomian daerah dibagi menjadi dua yaitu (a) Sektor basis: sektor perekonomian yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan kebutuhan daerah lain maupun ekspor (b) Sektor non basis: sektor perekonomian yang hanya dapat digunakan untuk memenuhi daerah sendiri. Kelemahan teori ini adalah perekonomian didasarkan pada permintaan eksternal, yang dapat

menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kekuatan-kekuatan pasar secara nasional maupun global.

- c) Teori Lokal, lokasi merupakan suatu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini sesuai jika dikaitkan dengan pengembangan kawasan industri. Perusahaan cenderung meminimumkan biaya dengan cara memilih lokasi yang memaksimalkan peluangnya untuk mendekati pasar dan bahan baku.
- d) Teori Tempat Sentral, teori ini menganggap bahwa ada hirarki tempat. Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumberdaya. Tempat sentral merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya.
- e) Teori Kausasi Kumulatif, kondisi daerah-daerah di sekitar kota yang semakin buruk merupakan konsep dasar dari teori kausatif kumulatif. Kekuatan-kekuatan pasar cenderung memperparah kesenjangan antara daerah-daerah tersebut. Daerah yang maju akan mengalami akumulasi kenggulan kompetitif dibanding daerah-daerah yang terbelakang. Hal ini oleh Myrdal disebut sebagai backwash effects.
- f) Teori Daya Tarik Industri, dalam teori ini dinyatakan bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap industrialisasi melalui pemberian subsidi dan insentif.⁵⁴

⁵⁴*Ibid.*, h. 116.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian ini disebut penelitian hukum normatif⁵⁵ dalam kerangka preskriptif hukum secara eksplanatoris yang berarti menerangkan, memperkuat, atau menguji suatu ketentuan mengenai pembangunan hukum pengembangan pusat halal di Indonesia.⁵⁶ Lebih spesifik penelitian ini menitikberatkan pada nilai-nilai ideal, yang menjadi rujukan dalam pembentukan, pengaturan, dan pembangunan hukum.⁵⁷ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dimana pada penelitian awal menggunakan data lapangan bersifat empiris maupun data primer lainnya selanjutnya penulis fokus pada bahan literasi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan pustaka atau literatur kepustakaan sebagai sumber tertulis sebagai langkah awal untuk menyiapkan kerangka penelitian dan memperdalam kajian teoritis. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik penelaahan terhadap referensi-referensi yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, khususnya pengembangan wisata syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (studi wisata halal nusa tenggara barat)”.⁵⁸

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan tentang Pengembangan wisata syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (studi wisata halal nusa tenggara barat) dalam konteks kebijakan hukum. Berdasarkan hal

⁵⁵Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010, h. 37.

⁵⁶Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 9.

⁵⁷Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grasindo, 2013, h. 89.

⁵⁸Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai “studi dogmatik” atau yang dikenal dengan *doctrinal research*. Lihat Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 86. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 113.

tersebut diperlukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kontekstual ekonomi syariah(*sharia economic contextual approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵⁹

B. Data dan Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah pengembangan wisata syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (studi wisata halal nusa tenggara barat)”, di rekam dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun data yang diperlukan bersumber dari berbagai pihak yang terkait dan sumber data skunder yaitu penunjang data yang didapat langsung berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Selanjutnya Bahan Hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini terbagi kepada tiga bahan, yakni bahan primer, sekunder dan tertier. Bahan primer terkait aturan regulasi (*regeling*) dan aturan kebijakan (*beschikking*). Selain sumber primer tersebut, sebagai bahan pendukung digunakan pula sumber sekunder dan tertier. Sumber sekunder yaitu karya-karya atau teori-teori yang membahas sumber primer, seperti, peraturan perundang-undangan, kitab fikih dan ushul fikih, kitab tafsir, serta pemikiran para pakar. Adapun sumber tersier yaitu hal-hal yang mendukung sumber primer dan sekunder seperti, kamus dan sebagainya.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat untuk menguraikan tentang FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA indonesia No: 1 08/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di MUI Pusat dan DSN MUI pusat di Jakarta.

⁵⁹Penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian hukum untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 94.

Selanjutnya untuk Pengembangan Wisata Syariah dalam mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah (studi wisata halal Nusa Tenggara Barat)” di tempat lokasi Nusa Tenggara Barat serta mengkaji juga tentang kebijakan hukum pengembangan wisata halal tentang peraturan Gubernur NTB nomor 51 tahun 2015 dan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 tahun 2016. Sedangkan waktu penelitian direncanakan selama April – November 2018 sebagai berikut mulai seminar penelitianperbaikan, penelitian lapangan, seminar natara, dan seminar hasil. Jangka waktu tersebut diharapkan dapat dilakukan semaksimal mungkin untuk menggali informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data penelitian ini menggunakan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi yaitu seperti berikut:

1. Teknik Observasi

observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik ini merupakan salah satu cara untuk memperoleh data primer⁶⁰ teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan mengamati secara langsung terhadap objek atau masalah yang akan diteliti, teknik observasi yang diamati peneliti adalah cara objek menyampaikan atau menjawab pertanyaan yang diberikan.

2. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan, data, informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil

⁶⁰Data primer merupakan data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumber utama.

bertatap muka⁶¹ dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan juga.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumentasi yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. dalam teknik ini yang akan didokumentasikan semua yang dilakukan dalam penelitian dalam mendapatkan data, sehingga data yang didapat merupakan data asli dari narasumber. Dalam teknik dokumentasi pada penelitian ini yaitu mendata kegiatan dalam pengembangan wisata syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (studi wisata halal nusa tenggara barat)’’.

E. Analisis Data

Analisis data yang dimaksudkan untuk mengorganisasikan data yang terkumpul. Adapun guna analisis data adalah untuk mengatur, mengurutkan serta mengelompokkan, memberi kode serta mengkategorikan⁶² penulis menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh milles dan huberman yakni sebagai berikut:⁶³

1. Data *Reduction* atau pengurangan data, merupakan suatu bentuk analisis yang relevan dan yang tidak relevan kemudian mengorganisasikan data.

⁶¹ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor; Ghalia Indonesia, 2005 h.193

⁶² Ronny Kountur, *Metode Penelitian*.....h.182

⁶³ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian*.....h.78

2. Data *Display* atau penampilan data, ialah data yang sudah relevan tersebut disaring dan dituangkan dalam bab IV berupa laporan yang tersusun secara sistematis.
3. Data *Conclusions* atau menarik kesimpulan dari data yang diperoleh dan selanjutnya mencari kesimpulan.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

1. Kredibilitas

Kredibilitas merupakan tujuan uji untuk menilai kebenaran dari temuan penelitian kualitatif⁶⁴. Kredibilitas ditunjukkan ketika partisipan mengungkapkan bahwa transkrip penelitian memang benar-benar sebagai pengalaman dirinya sendiri.

2. Transferabilitas

Transferabilitas adalah berkaitan dengan hasil penelitian dapat digunakan pada konteks yang lebih spesifik.

3. Dependabilitas

Dependabilitas adalah menekankan kepada peneliti untuk melaporkan konteks setiap perubahan yang terdapat dalam penelitian.

4. Konfirmabilitas

Konfirmabilitas adalah hasil penelitian dapat dibenarkan oleh orang lain. Artinya apa yang ditemukan, dituliskan dan dilaporkan sesuai dan dapat dibenarkan

G. Pengabsahan Data

Pengabsahan data sangat diperlukan karena menjamin bahwa semua hasil dan pengamatan atau observasi, wawancara dan dokumentasi memang benar dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lokasi penelitian. Hal ini di

⁶⁴*Ibid*

lakukan penulis untuk memelihara dan menjamin kebenaran bahwa data-data yang dikumpulkan memang benar adanya dan dapat dipercaya. Untuk memperoleh data yang valid dan akurat teknik yang digunakan adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi ialah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu.⁶⁵ Untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

Teknik triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber yang merupakan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. menurut Patton yang dikutip Lexy. J. Moleong hal ini dapat dicapai dengan cara :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁶⁶

H. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan untuk meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan data yang ada dan membuat interpretasi yang diperlukan. Selain itu, analisis data dapat digunakan untuk mengidentifikasi ada tidaknya masalah. Jika ada, masalah tersebut harus dirumuskan dengan jelas dan benar.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Disebut deskriptif karena dalam penelitian menggambarkan objek permasalahan fakta secara sistematis, cermat dan mendalam terhadap kajian penelitian. Mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.⁶⁷ Menurut Nasir, deskriptif ialah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia,

⁶⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*., hal. 178.

⁶⁶*Ibid.*,

⁶⁷Seuharsimi Arikonto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003, hal. 309

suatu objek bahkan suatu sistem atau kelas pariwisata pada masa sekarang yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antara fenomena yang diselidiki.

Dalam menganalisa data ada beberapa langkah yang ditempuh yaitu:

1. *Collections* atau pengumpulan data ialah mengumpulkan data sebanyak mungkin mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
2. *Display data* atau penyajian data ialah data yang sudah di reduksi tersebut disajikan kedalam bentuk laporan.
3. *Coclusions drawing* atau penarikan kesimpulan dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan penyajian data.
4. *Verifikasi* atau penarikan kesimpulan, dimana setelah data semuanya di peroleh kemudian mencari kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah.⁶⁸

⁶⁸Matthew B. Miles dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data kualitatif terjemahan Tjejep Rohendi Rihidi*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1992, hal. 21

BAB IV

PEMAPARAN DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Barat (disingkat NTB) ialah sebuah provinsi di Indonesia yang berada pada bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara. Provinsi ini beribu kota di Mataram dan memiliki 10 (sepuluh) Kabupaten dan Kota.

Pada awal kemerdekaan Indonesia, wilayah ini termasuk dalam wilayah Provinsi Sunda Kecil yang beribu kota di Singaraja. Kemudian, wilayah Provinsi Sunda Kecil dibagi menjadi 3 provinsi: Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dua pulau terbesar di provinsi ini adalah Lombok yang terletak di barat dan Sumbawa yang terletak di timur.

Sebagian besar dari penduduk Lombok berasal dari suku Sasak, sementara masyarakat Bima (suku Mbojo) dan Sumbawa merupakan kelompok etnis terbesar di Pulau Sumbawa. Mayoritas penduduk Nusa Tenggara Barat beragama Islam, yaitu sekitar (94%).

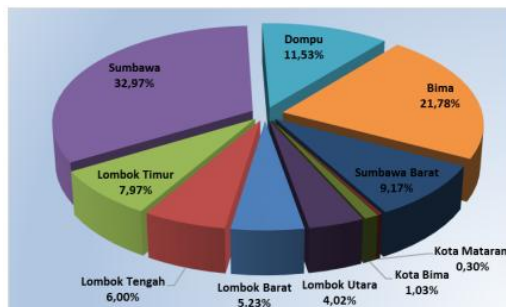
Nusa Tenggara Barat terdiri dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, memiliki luas wilayah 20.153,15 km². Terletak antara 115° 46' - 119° 5' Bujur Timur dan 8° 10' - 9 °g 5' Lintang Selatan. Selong merupakan kota yang mempunyai ketinggian paling tinggi, yaitu 148 m dari permukaan laut, sementara Raba terendah dengan 13 m dari permukaan laut. Dari tujuh gunung yang ada di Pulau Lombok, Gunung Rinjani merupakan gunung tertinggi dengan ketinggian 3.775 m, sedangkan Gunung Tambora merupakan gunung tertinggi di Sumbawa dengan ketinggian 2.851 m.

Sungai-sungai di Nusa Tenggara Barat dikelompokkan ke dalam dua wilayah sungai, yaitu Wilayah Sungai (WS) yaitu WS Lombok dan WS Sumbawa. WS Lombok terdiri atas 197 DAS dan WS Sumbawa 555 DAS.

Wilayah administrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari beberapa kota atau kabupaten yakni:

1. Kabupaten Bima
2. Kabupaten Dompu
3. Kabupaten Lombok Barat
4. Kabupaten Lombok Tengah
5. Kabupaten Lombok Timur
6. Kabupaten Lombok Utara
7. Kabupaten Sumbawa
8. Kabupaten Sumbawa Barat
9. Kota Bima
10. Kota Mataram⁶⁹

Persentasi pembagian luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat:



Untuk batas-batas wilayah provinsi nusa tenggara barat adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Jawa
 Sebelah Selatan : Samudera Hindia
 Sebelah Timur : Selat Lombok / Provinsi Bali
 Sebelah Barat : Selat Sape / Provinsi NTT.⁷⁰

2. Gambaran Wisata Halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat

⁶⁹BAPPEDA Provinsi NTB, Nusa Tenggara Barat dalam angka 2013.

⁷⁰Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pariwisata halal adalah bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan Muslim. Pelayanan wisatawan dalam pariwisata halal merujuk pada aturan-aturan Islam. Salah satu contoh dari bentuk pelayanan ini misalnya Hotel yang tidak menyediakan makanan ataupun minuman yang mengandung alkohol dan memiliki kolam renang serta fasilitas spa yang terpisah untuk pria dan wanita.

Selain hotel, transportasi dalam industri pariwisata halal juga memakai konsep Islami. Penyedia jasa transportasi wajib memberikan kemudahan bagi wisatawan Muslim dalam pelaksanaan ibadah selama perjalanan. Kemudahan ini bisa berupa penyediaan tempat sholat di dalam pesawat, pemberitahuan berupa pengumuman maupun adzan jika telah memasuki waktu sholat selain tentunya tidak adanya makanan atau minuman yang mengandung alkohol dan adanya hiburan Islami selama perjalanan. Hingga 2015, pertumbuhan industri pariwisata halal dapat dikatakan sebagai pertumbuhan terbesar dibandingkan dengan jenis pariwisata lainnya.

Perkembangan sektor pariwisata di Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini telah tumbuh pesat, dan sebagai industri yang mempunyai peranan penting dalam menghasilkan devisa Negara. Kemajuan tersebut tidak terlepas dari usaha-usaha pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam pembangun dan pengembangan pariwisata.⁷¹

Salah satu tujuan wisata yang saat ini sedang berkembang pesat adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) khususnya Pulau Lombok. Pariwisata Lombok memenuhi segala aspek untuk tumbuh menjadi salah satu destinasi penting dalam bisnis pariwisata. Keindahan alam Pulau Lombok terpampang pada pesona lautan, garis pantai, keindahan bawah laut, pesona pegunungan terutama Gunung Rinjani, perbukitan, air terjun, sungai, daerah pedesaan, hutan, dan lain sebagainya. Di samping itu, keindahan alam itu didukung oleh penduduknya yang ramah, bersahabat, dan terbuka, dengan praktik-praktik tradisi dan adat istiadat yang unik dan beragam. Gambaran-gambaran tersebut menjadi jaminan bagi para wisatawan untuk mendapatkan pengalaman berwisata yang menggairahkan serta menyenangkan

⁷¹Ulya, *Wisata Halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat*, lihat <https://ulyadays.com/wisata-halal-di-provinsi-nusa-tenggara-barat/>

sehingga menimbulkan kepuasan wisatawan dan mendorong kunjungan kembali (Batour dkk, 2010).

Salah satu sumber wisatawan atau juga dapat disebut sebagai investor konsumen dalam industri pariwisata adalah wisatawan Muslim. Mereka adalah pangsa pasar industri pariwisata yang sangat prospektif, baik secara jumlah kunjungan maupun jumlah pengeluaran yang mereka belanjakan dalam kegiatan berwisata. Umat Islam merupakan pasar global dengan sekitar 1,8 milyar pelanggan potensial. Mereka juga investor konsumen yang cukup besar jika melihat pengeluaran mereka dalam kegiatan wisata. Namun, ada perlakuan berbeda yang dibutuhkan dalam pelayanan terhadap wisatawan Muslim. Atribut-atribut keagamaan yang melekat pada diri mereka, beserta ketentuan-ketentuan agama yang berpengaruh pada kegiatan wisata mereka menimbulkan suatu tuntutan special dalam industry pariwisata. Dalam hal ini, munculah kemudian istilah atau konsep wisata halal atau dapat pula disebut wisata syari'ah atau wisata Islam yang didesign khusus untuk memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim (Sriprasert, 2014).

Wisata halal semakin penting artinya dalam menggaet wisatawan muslim karena nuansa keagamaan sangat mempengaruhi pilihan tujuan wisata mereka. Wisatawan-wisatawan Muslim dari teluk Arab terkenal sangat kuat memegang ketentuan-ketentuan agama. Menurut United Nation World Tourism Organization (UNWTO), diperkirakan pada tahun 2020 akan ada sekitar 69 juta wisatawan dari Timur Tengah yang akan berwisata keluar negeri. Hal ini menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 6,7% selama periode 1995- 2020, yang berada di atas global. Angka tersebut juga menunjukkan bahwa wisatawan dari negara-negara teluk Arab menghabiskan USD 20 milyar untuk liburan setiap tahun. Pengeluaran tertinggi dipimpin oleh wisatawan dari Arab Saudi yang memuncaki pengeluaran sebesar USD 8,5 milyar (Chandra, 2014).⁷²

Beberapa waktu yang lalu, Pulau Lombok mendapatkan penghargaan dalam bidang pariwisata pada ajang World Halal Travel Award 2015 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Dalam ajang tersebut, Lombok menggondol prestasi prestisius pada dua kategori, yakni The Best Halal Destination Award 2015 dan The Best Halal

⁷²*Ibid.*

Destination Honeymoon Award 2015. Prestasi tersebut membuka kesempatan besar bagi daerah ini untuk mengembangkan bisnis pariwisata dengan mengusung konsep pariwisata ramah bagi masyarakat Muslim, dan kesempatan tersebut membawa peluang besar untuk menjadi destinasi wisata halal utama di dunia.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memang sudah selayaknya mengembangkan konsep halal dalam sektor pariwisatanya, mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam. Di sisi lain, hubungan kebudayaan antara masyarakat NTB dan negara-negara di dunia Islam khususnya Timur Tengah sudah terjalin lama melalui pendidikan dan perjalanan ibadah. Masyarakat NTB telah lama menjadikan negara-negara Islam di Timur Tengah sebagai tujuan menuntut ilmu.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi daerah pertama sekaligus satu-satunya di Indonesia yang memiliki Peraturan Daerah (Perda) mengenai pariwisata halal.

Dalam Perda No. 2 Tahun 2016 tentang pariwisata halal, tertulis bahwa ruang lingkup pengaturan Pariwisata Halal dalam Peraturan Daerah ini meliputi destinasi, pemasaran dan promosi, industri, kelembagaan, pembinaan, pengawasan dan pembiayaan. Pengelola destinasi pariwisata halal harus membangun fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan aktivitas kepariwisataan halal, seperti tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan Muslim, serta fasilitas bersuci yang memenuhi standar syariah.

Industri yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang tidak berpatokan pada prinsip syariah, apabila bersedia menjadi industri berbasis pariwisata halal pun wajib menyediakan arah kiblat di kamar hotel, juga informasi masjid terdekat, tempat ibadah bagi wisatawan dan karyawan Muslim, keterangan tentang produk halal dan tidak halal, tempat wudhu terpisah antara laki-laki dan perempuan, sarana pendukung untuk melaksanakan sholat, serta tempat urinoir yang terpisah antara laki-laki dan perempuan.

Dalam hal penyediaan makanan dan minuman, industri wajib memiliki sertifikasi halal dan menjamin kehalalan yang disajikan. Sementara pada pengusaha SPA, sauna dan griya pijat yang halal maka wajib menyediakan ruangan perawatan untuk pria dan wanita secara terpisah, terapi pikiran dan olah fisik yang tidak

melanggar syariah, terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita, serta memiliki sarana yang memudahkan untuk sholat. Lebih lanjut L.M Faozal menjelaskan “Kira-kira sudah 100 hotel yang sudah disertifikasi halal, contohnya Hotel Sentosa ini, Novotel Lombok juga memberanikan diri, tapi lihat saja sekarang hotel itu tidak pernah sepi tetap ramai,”

Sejak Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya Pulau Lombok berhasil mendapatkan penghargaan sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia tahun 2015 dan 2016. Ditambah satu lagi penghargaan destinasi wisata bulan madu halal terbaik dunia tahun 2016, predikat halal tourism atau wisata halal itu pun seperti identik dengan nama NTB.

Perkembangan pariwisata di NTB pun tergolong pesat dalam tiga tahun terakhir dengan pertumbuhan wisatawan yang tumbuh di atas 20%. Berdasarkan analisis SWOT yang bersumber dari Standing Committee of Economic and Commercial Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation (COMCEC) yang dikutip dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional NTB disebutkan bahwa kekuatan dalam pelaksanaan wisata halal di Indonesia lebih besar daripada kelemahannya.⁷³

Dalam laporan tersebut dipaparkan beberapa kekuatan Indonesia dalam melakukan program wisata halal antara lain berpengalaman dalam penyediaan tempat ibadah sholat di area publik. Selain itu, atraksi untuk wisatawan berkembang baik dan banyak tersedia di Indonesia. Perkembangan hotel syariah dan tempat wisata yang memiliki “*value for money*” juga dimiliki oleh Indonesia.

Dengan kondisi tersebut, Indonesia khususnya NTB yang saat ini tengah gencar melakukan branding terkait pariwisata halal harus dapat melihat peluang yang ada. Disebut, dukungan media untuk meningkatkan informasi masyarakat dalam wisata halal harus dapat dimanfaatkan dengan baik. Pengemasan dan pengembangan pariwisata juga harus secara nyata dilakukan agar memiliki nilai tambah bagi wisatawan.

Potensi halal tourism yang dimiliki oleh Provinsi NTB sangat besar. Provinsi NTB merupakan salah satu model wisata halal di Indonesia. Pengembangan halal

⁷³BAPPEDA PROVINSI NTB, *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional NTB*.

tourism di Provinsi NTB terus dilakukan melalui upayaupaya seperti Peraturan Daerah Pariwisata Halal yang merupakan pertama di Indonesia yaitu Peraturan Daerah Provinsi NTB No.2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal.

Tempat-tempat wisata yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:

1. Pantai Senggigi
2. Pantai Pink
3. Gili Trawangan
4. Taman Narmada
5. Gunung Rinjani
6. Pura Batu Bolong
7. Pantai Kuta Lombok
8. Pantai Sire
9. Pantai Sekotong
10. Batu Layar
11. Ampenan Kota Tua
12. Gunung Tambora
13. Pulau Satonda
14. Pulau Kenawa

B. Penyajian Data Penelitian

Pariwisata halal adalah sebuah konsep pariwisata yang dalam pengemasan pariwisatanya terdapat nilai-nilai dan prinsip Islam yang dapat dinikmati semua wisatawan dari berbagai latar belakang agama dengan memenuhi kebutuhan dasar wisatawan muslim, seperti fasilitas ibadah yang mudah diakses, produk makanan maupun minuman dengan jaminan halal, serta tempat tinggal yang ramah terhadap wisatawan muslim seperti hotel syariah dan lainnya. Konsep pariwisata halal tersebut perlu kiranya sangat penting untuk diketahui dan dikembangkan. Oleh karena itu penting kiranya para peneliti untuk menggali lebih dalam terkait konsep pengembangan wisata halal yang ditawarkan di kawasan Nusa Tenggara Barat.

Lebih lanjut tentang pengembangan adalah suatu atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada, yang

dapat dipertanggung jawabkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menghasilkan produk baru melalui pengembangan. Berdasarkan pengertian pengembangan yang telah diuraikan yang dimaksud dengan pengembangan adalah suatu proses untuk menjadikan potensi yang ada menjadi sesuatu yang lebih baik dan berguna sedangkan penelitian dan pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk atau menyempurnakan produk yang telah ada menjadi produk yang dapat dipertanggung jawabkan terutama di bidang pariwisata halal.

Berikut hasil wawancara peneliti tentang konsep pengembangan wisata halal yang ditawarkan di kawasan Nusa Tenggara Barat:

1. Subjek pertama Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat

a. Bu alfi dispar NTB (bagian produk pariwisata)

Q; Wisata Halal?

A: Yang harus diketahui bahwa NTB itu menganut hilal 1, indikatornya yaitu memudahkan kepada orang-orang muslim, lebih kepada friendly muslim, kenyamanan, kepastian bahwa seorang muslim bisa beribadah dimanapun di Lombok ini.

Sebenarnya tidak banyak yang disiapkan untuk fasilitas ibadah ini, karena hampir semua setiap sudut lombok ini sudah tersedia musholla maupun mesjid yang kita bilang representatiflah lebih dari cukuplah untuk daerah-daerah sepanjang jalur wisata kita. Begitupun di ibjek-objek wisata, walaupun dia terpencil musholla dan kesediaan sarana untuk beribadah memang harus ada, nah itulah yang kita anut. Mungkin kawan-kawan melihat tidak ada perbedaan khusus terkait itu (wisata halal), tetapi ada beberapa yang memang melaksanakan itu, hanya beberapa industri/ penyedia jasa ini yang melaksanakan itu (wisata halal). Beberapa maksudnya dia punya objek wisata yang dikelola sendiri, dia melaksanakan syariah, perbedaan itu ada, Cuma tidak semua. Tidak semua melaksanakan ketentuan itu. Tapi yang berbasis pondok pesantren, berbasis lembaga ituyang dikelola oleh perorangan atw komunitas ada beberapa yang sudah memisahkan itu (wisata halal dan tidak), ini kolam mandi laki-laki ini kolam mandi perempuan begitu ada beberapa.

Q: kebijakan dinas pariwisata ada tidak tentang wisata halal?

A: untuk pengawasan, pembinaan iya, cuman kita pembinaanya tidak mengarah kepada intervensi harus wisata halal tidak sejauh itu. Cuman kita Menyiapkan, kalian kalau ini (menerapkan wisata halal) kita sudah

menganut halal harus memberikan fasilitas ini, kaya pertamina itu lo, ada SOPnya, kalian kalo sudah menganut pariwisata halal baik yang sudah dikelola oleh gagas oleh komunitas maupun perorangan harus menyediakan fasilitas untuk ibadah. SOP belum ada, cuman ada ketentuan perda ada. Kami juga punya tim percepatan, tim ini memebrikan advokasi, memberikan gambaran, karena ada masyarakat yang bertanya, kenapa kami harus begini begitu, tidak ada pengharusan sebenarnya, bukan sebuah paksaan, ini adalah produk, ini ada peluang pasar, silahkan kalian bisa ambil peluang, itu yang kita tawarkan ke industri, lebih kepada pembinaannya. Peluang muslim traveller, peluang ke kita itu ada, silahkan kalian ambil kesempatan ini.

Q: pengaruh terhadap PAD

A: kami tidak punya catatan ini, tapi secara pergerakan ekonomi, secara umum itu terlihat, mengalami peningkatan. Bisa dilihat dari jumlah wisatawan yang berasal dari negara-negara muslim, brunei, malaysia, dan walaupun bukan reguler mereka menghormati adat istiadat kita. Kita sekarang sedang membangun yang namanaya pariwisata berbasis desa wisata. Desa wisataan otomatis berada di desa-desa yang kultur dasa masyarakatkan muslim, meraka menetapkan itu. Mereka masuk ke desa kami harus berpakaian sopan, berjalan. Bagi mereka ini berwisata sambil mereka meniru, memahami budaya setempat, pola kehidupan masyarakat di desa itu, menariknya disini. Jadi mereka berjalan-jalan di desa, sudah menggunakan pakain yang sopan.

Q: desanya dimana saja bu?

A: kami banyak desa wisata yang walaupun tidak dibranding sebagai desa wiasata halal, hampir semua desa itu membuat aturan yang disepakati oleh desa itu, aturan kesepakatan masyarat, pemuka desa, bukan perdes. Hukum adat tidak tertulis dan tertulis tapi bukan perdes. Mengatur tentang kearifan lokal tata kehidupan mereka.

Q: bagaimana cara memberikan kesadaran wisata halal?

A: kita lakukan pendekatan agama itu dulu, hanya awalnya hampir semua, mesjid musholla, pondok pesantren kita sebarakan setiap jumat, sekali sebulan mungkin dalam setiap jumatnya meraka bisa menyispkan khutbah jumatnya berisikan pariwisata ini. Kita bangun dulu kesadaran bahwa ada wisata halal. Baru gubernur baru yang terpilih ini, mencanangkan 99 desa wisata karena filosofinya asmaulhusna. Kalo bisa desa wisata ini separonya berisikan wisata halal.

Q. Dicanangkan dari kapan?

Program pak gubernur, ini rencana di launching oleh kementerian desa, SK sudah keluar oleh gubernur, sebeanrnya dulu sudah ada desa wisata, hanya saja gubernur yang baru mencangkakan 99 desa wisata.

Q: Untuk fokus produk halal arahnya kemana bu?

A: perhotelan, kuliner. Kalo sekarangkan MUI itu lebih kepada produk makanannya, kalo diusahanya belum, karena DSNnya belum terbentuk, hanya menggunakan undang-undang 33 tahun 2014 itu saja jaminan produk halal, kita merujuknya keasna. Untuk usaha sendiri belum. Jadi kalo ditanya mana hotel yang bersertifikasi halal, mana usahanya yang bersertifikasi halal, karena belum ada. Memang harus ada dorongan dari berbagai pihak agar undang-undang terkait usaha produk halal itu harus ada. Usahanya bukan produknya.

Q: kalo ini masuk binaan juga tidak (brosusr perjalanan halal)?

A: kalo ini kita hanya memberikan polanya, kalo yang jual kan mereka, kita susun itu, pelaksanya mereka, makanya lebih kepada polanya saja.

2. Bu dina dispar NTB (bagian infrastruktur)

Q: Menurut ibu sendiri bagaimana tentang konsep pariwisata halal itu sendiri yang ada di provinsi NTB?

A: Sebenarnya banyak orang yang salah paham tentang konsep wisata halal ini, kebanyakan masyarakat mengira bahwa wisata halal itu dipahami harus sesuai tuntutan syariat, sebagai contoh pantai syariah mereka memhami pantai syariah ini sebagai wisata halal semuanya baik dari orangnya, tempatnya dan lain sebagainya harus sesuai syariat Islam. Orang individualnya harus menggunakan busana muslim (tidak boleh terbuka dan mengumbar aurat) serta sesuai syariat yang lainnya. Sebenarnya itu betul, tetapi khusus di NTB itu menganut hilal 1 yang artinya lebih memudahkan kepada para wisatawan terutama orang-orang muslim, lebih mudah untuk bersuci dan fasilitas untuk ibadah. Selain itu juga dari sisi makanan juga harus halal. Konsep selanjutnya secara

bertahap dan belum bisa terlaksana yaitu konsep hilal 2 ini lebih tinggi lagi tingkatannya yakni memang wisata halal tersebut, baik dari sisi pengelola harus benar-benar paham dengan kajian syariat, pengunjungnya memang harus berbusana muslimah sesuai aturan syariah serta karakter kepribadiannya juga harus benar-benar sesuai prinsip syariat. Sementara kita masih menggunakan hilal 1 secara bertahap.

3. Pak alif dispar NTB (bagian diklat)

Q: Menurut bapak sendiri bagaimana tentang konsep pariwisata halal itu sendiri yang ada di provinsi NTB?

A: Sebenarnya banyak orang yang salah paham tentang konsep wisata halal ini, kebanyakan masyarakat mengira bahwa wisata halal itu dipahami harus sesuai tuntutan syariat, sebagai contoh pantai syariah mereka memhami pantai syariah ini sebagai wisata halal semuanya baik dari orangnya, tempatnya dan lain sebagainya harus sesuai syariat Islam. Orang individualnya harus menggunakan busana muslim (tidak boleh terbuka dan mengumbar aurat) serta sesuai syariat yang lainnya. Sebenarnya itu betul, tetapi khusus di NTB itu menganut hilal 1 yang artinya lebih memudahkan kepada para wisatawan terutama orang-orang muslim, lebih mudah untuk bersuci dan fasilitas untuk ibadah. Selain itu juga dari sisi makanan juga harus halal. Konsep selanjutnya secara bertahap dan belum bisa terlaksana yaitu konsep hilal 2 ini lebih tinggi lagi tingkatannya yakni memang wisata halal tersebut, baik dari sisi pengelola harus benar-benar paham dengan kajian syariat, pengunjungnya memang harus berbusana muslimah sesuai aturan syariah serta karakter kepribadiannya juga harus benar-benar sesuai prinsip syariat. Sementara kita masih menggunakan hilal 1 secara bertahap.

f. Subjek kedua masyarakat

1. Mas wirya

Q: dari sisi pengelolaan perjalanan industri perjalanan wisata di lombok?

A: belum semua di explore, tapi beberapa yang sudah di explore, salah satunya air terjun terbaik di lombok, tien kelep, saya masuk ke sana, akses jalan awalnya bagus sekali, tapi setelah gempa banyak yang harus diperbaiki, dan itu tidak aman dibuka jalur itu oleh pemerintah atw

swasta, terkait keamanan akses. Secara umum destinasi wisata sudah sangat baik, Lombok sudah siap untuk di datangi oleh wisatawan mancanegara maupun domestik, bandara sudah internasional. Australia sudah buka jalur penerbangan. Perhotelan juga sudah representatif.

Q: harapan untuk wisata halal di Lombok?

A: harapannya bisa menambah jumlah kunjungan ke Lombok, pulau seribu mesjid, dan menjadi world halal tourism.

2. Mas David

Q: dilihat dari branding dan informasi tentang pariwisata Lombok jika dihubungkan dengan kemajuan teknologi informasi saat ini? Apakah sudah memiliki database yang akurat dalam memberikan informasi publik?

A: contohnya desa wisata Ende belum ada promosi sendiri dari pengelola, masih mengandalkan dari dinas pariwisata dan pemerintah.

Q: ada kesenjangan, maka ada peluang investasi yaitu pengelolaan pariwisata dari sisi go informasi, rekomendasi Anda bagaimana?

A: sebaiknya kalo bisa kalo memang ada yang cover untuk bidang informasi yang terintegrasi, harapannya pemerintah melakukan kerjasama dengan swasta.

Q: dari sisi branding sudah muncul atau tidak terkait pariwisata halal apakah ada kekhususan, apakah ada webnya ataupun platformnya?

A: belum, masih bergabung dalam wisata secara umum.

Q: dari sisi halal food, apakah Anda melihat secara fakta di lapangan di lokasi wisata ada label halal?

A: sudah ada, sampai ke yang kecil-kecil.

Q: wisata halal yang diterapkan yang Anda ketahui?

A: sejauh ini masih hanya makanannya.

3. Mas theo

Q: ada kesenjangan, maka ada peluang isnvestasi yaitu pengelolaan pariwisata dari sisi go informasi, rekomendasi Anda bagaimna?

A: tergantung lokasi mana yang cocok, contoh kalo kaya kawasan kek mandalika itu sudah bnyak investor yang ke sana, sudah sangat dipermudah untuk regulasi dan perizinan, sepanjang mandalika, lokasi dibebaskan dibawah ITDC semua, kalo jalan-jalan ke sana kalo ngeliat tanah yang sudah di tembok bertti itu sudah ada investornya. Masalahnya sekarang banyak investor yang beli lokasi tapi belum di eksekusi. Itu kalo yang di lombok tengah, kawasan ekonomi khususnya. Kalo dia lombok barat wilayah sekotong daerah pelabuhan, pelabuhan samudera. Masalah dsana itu adalah overload tanah kepimilikan, makanya tidak ada investor yang masuk.

Q: yang ikonik untuk wisata halal? bangunan? ketokohan? makam?

A: Di lombok itu banyak sekali wisata religi, makam lowangbalo, makam batu layar, itu tergantung travelnya agennya mau mengarahkan atau tidak, jadi masih mix, masih choice dan umum, tergantung request. Daerah bayan itu ada mesjid kuno. Ada sih bebrapa tapi tidak bnyak yang menawarkan.

A: ada, restoran hongkong berlabel halal bersertifikat.

4. Mba Rindi

Q: wisata halal itu apa sih?

A: wisata yang semuanya muslim friendly, makanan, tempat, dll.

Q: harapan ituk pariwisata lombok?

A: wisata alam dll sudah tersedia disini dan berpotensi, tinggal dari segi pendukungnya seperti aksesibilitas, atraksi wisata kaya di desa dasa, rinajani dll. dan amenitas seperti restoran, hotel dan pusat oleh-oleh lebih dimajukan, branding lebih dinaikkan.

Q: kawasan wisata halal apakah industri ini akan menambah potensi ataukah menjadi penghambat?

A: pangsa pasarnya, dari dinas sendiri pangsa pasar sendiri dari timur tengah, mkanyadicanagkan wisata halal untuk melirik pangsa pasar wisatawan dari timur tengah dan negara muslim, dan itu tidak jadi masalah terkait jumlah wisatawan yang datang, karena itu adalah alternatif dan pilhan dari wisatwan sendiri.

Q: Harapan?

A: pemerintah, pengusaha dan msyarakat harus membanahi diri dengan adanya penghargaan halal.

A: masih perlu waktu, dan lumayan cukup lama untuk bisa menjadi sesuai penghargaan.

C. Analisis Data

Analisis data ini, berisi tentang pembahasan dan analisis kesimpulan hasil dari penelitian tentang “PENGEMBANGANWISATA SYARIAH DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH (STUDI WISATA HALAL NUSA TENGGARA BARAT) ”.

1. Konsep pengembangan wisata halal yang ditawarkan di kawasan Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan hasil penelitian tentang Konsep pengembangan wisata halal yang ditawarkan di kawasan Nusa Tenggara Barat yang telah dilakukan penelitian dapat diklasifikasi bahwa pengembangan pariwisata halal di Nusa Tenggara Barat dapat dilihat dalam uraian berikut ini:

a. *Road Map* pengembangan wisata halal di NTB

Road map pengembangan wisata halal di Nusa Tenggara Barat dilakukan oleh Pemda NTB lewat Dinas Pariwisata NTB dalam pengembangan wisata syariah khususnya wisata halal. Salah satu upaya Pemda NTB dalam konteks pengembangan wisata halal itu adalah

pengaturan konsep wisata syariah dalam perda, upaya demikian dilakukan untuk menjamin pelaksanaan wisata halal di NTB dalam tataran regulasi dan lainnya.

Penetapan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai destinasi wisata syariah pada 2015 lalu mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) NTB untuk melakukan konseptualisasi wisata syariah. Konseptualisasi itu diharapkan dapat diterima baik oleh wisatawan, pelaku usaha dan pemerintah daerah sendiri. Untungnya, sejak awal NTB merupakan daerah destinasi wisata di Indonesia, karena itu Pemda sejatinya tidak perlu terlalu khawatir daerahnya tidak dikunjungi wisatawan. Adapun kemudian terjadi kecenderungan peningkatan jumlah wisatawan muslim yang berkunjung ke suatu destinasi wisata memang perlu ditangkap sebagai peluang peningkatan devisa negara melalui pariwisata, apalagi memang wisatawan muslim memiliki keunikan tersendiri, keinginan untuk berwisata sembari tetap melaksanakan ajaran-ajaran agamanya, mulai shalat, makan makanan halal, menghindari minuman beralkohol, privasi dan kenyamanan bersama keluarga saat berwisata. Keinginan untuk melaksanakan ajaran agama dalam berwisata itu yang disebut oleh Global Travel Indeks sebagai kebutuhan dasar wisatawan muslim dunia. Agar konsep integrasi kebutuhan dasar berbasis agama dalam berwisata itu tidak melahirkan kesalahpahaman wisatawan lainnya yang hendak berkunjung ke NTB, Pemda NTB memilih menggunakan istilah wisata halal ketimbang wisata syariah.⁷⁴

Hal itu, tampak pada perda wisata halal yang dikeluarkan oleh pemda NTB. Istilah wisata halal memang sudah lebih dahulu dikenal dalam pariwisata global, istilah-istilah seperti halal *tourism*, *islamic tourism*, dan *muslim family friendly* merupakan istilah yang telah dikenal di beberapa

⁷⁴A. Muchaddam Fahham, *Tantangan Pengembangan Wisata Halal di Nusa Tenggara Barat*, Aspirasi Vol. 8 No. 1, Juni 2017, h. 70.

negara seperti Jepang, Thailand, Turki, Korea Selatan, Australia, dan Inggris. Dalam kasus NTB, pengembangan wisata halal diarahkan kepada wisata keluarga dengan mengakomodir kebutuhan dasar wisatawan muslim dan diperkuat dengan wisata religi dan budaya. Pengembangan wisata halal seperti itu mendorong Pemda NTB untuk melakukan percepatan sertifikasi halal bagi restoran dan hotel, perbaikan infrastruktur jalan dan moda transportasi. Selain itu, pengembangan wisata halal di NTB meniscayakan lahirnya Peraturan Daerah yang menjadi acuan hukum dalam pelaksanaan wisata halal di NTB.

Pelaksanaan wisata halal di provinsi Nusa Tenggara Barat sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsep wisata konvensional pada umumnya. Wisata halal dan wisata konvensional secara umumnya baik wisata alam (ekowisata), wisata belanja, wisata edukasi, wisata kuliner, budaya, wisata berburu dan jenis wisata lainnya.

Secara khusus saja yang membedakan yaitu terdapatnya batasan hilal yang harus ada di wisata halal. Terkait batasan hilal tersebut lebih lanjut ibu alfi kepala seksi bagian produk wisata dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat Menjelaskan:

Yang harus diketahui bahwa NTB itu menganut hilal 1, indikatornya yaitu memudahkan kepada orang-orang muslim, lebih kepada friendly muslim, kenyamanan, kepastian bahwa seorang muslim bisa beribadah dimanapun di Lombok ini.

Sebenarnya tidak banyak yang disiapkan untuk fasilitas ibadah ini, karena hampir semua sudut lombok ini sudah tersedia musholla maupun mesjid yang kita bilang representatiflah lebih dari cukuplah untuk daerah-daerah sepanjang jalur wisata kita. Begitupun di ibjek-objek wisata, walaupun dia terpencil musholla dan kesediaan sarana untuk beribadah memang harus ada, nah itulah yang kita anut. Mungkin kawan-kawan melihat tidak ada perbedaan khusus terkait itu (wisata halal), tetapi ada beberapa yang memang melaksanakan itu, hanya beberapa industri/ penyedia jasa ini yang melaksanakan itu (wisata halal). Beberapa maksudnya dia punya objek wisata yang dikelola sendiri, dia melaksanakan

syariah, pembedaan itu ada, Cuma tidak semua. Tidak semua melaksanakan ketentuan itu. Tapi yang berbasis pondok pesantren, berbasis lembaga itu yang dikelola oleh perorangan atw komunitas ada beberapa yang sudah memisahkan itu (wisata halal dan tidak), ini kolam mandi laki-laki ini kolam mandi perempuan begitu ada beberapa.

Lebih lanjut pak alif kepala seksi bagian diklat yang sebelumnya staff bagian pariwisata halal menjelaskan tentang wisata halal 1:

Sebenarnya banyak orang yang salah paham tentang konsep wisata halal ini, kebanyakan masyarakat mengira bahwa wisata halal itu dipahami harus sesuai tuntutan syariat, sebagai contoh pantai syariah mereka memhami pantai syariah ini sebagai wisata halal semuanya baik dari orangnya, tempatnya dan lain sebagainya harus sesuai syariat Islam. Orang individualnya harus menggunakan busana muslim (tidak boleh terbuka dan mengumbar aurat) serta sesuai syariat yang lainnya. Sebenarnya itu betul, tetapi khusus di NTB itu menganut hilal 1 yang artinya lebih memudahkan kepada para wisatawan terutama orang-orang muslim, lebih mudah untuk bersuci dan fasilitas untuk ibadah. Selain itu juga dari sisi makanan juga harus halal. Konsep selanjutnya secara bertahap dan belum bisa terlaksana yaitu konsep hilal 2 ini lebih tinggi lagi tingkatannya yakni memang wisata halal tersebut, baik dari sisi pengelola harus benar-benar paham dengan kajian syariat, pengunjungnya memang harus berbusana muslimah sesuai aturan syariah serta karakter kepribadiannya juga harus benar-benar sesuai prinsip syariat. Sementara kita masih menggunakan hilal secara bertahap.

Dari hal tersebut dapat dipahami sebagai strategi tersendiri oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat agar tidak terlalu membedakan wisata konvensional secara umum dengan wisata halal yang ada di NTB. Secara khusus saja yang mengatur kemudahan dalam memperoleh fasilitas dalam beribadah dan menjaga makanan dari sisi kehalalan. Hal ini dapat dipahami karena konsep wisata halal yang dianut di nusa tenggara barat menggunakan konsep hilal 1.

Lebih lanjut konsep industri wisata halal yang ada di perda, industri pariwisata halal adalah usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang berpatokan pada prinsip-prinsip syariah dalam perspektif DSN-MUI. Industri pariwisata halal terdiri dari akomodasi, biro perjalanan, restoran, dan SPA. Pengelolaan industri pariwisata halal mengikuti ketentuan DSN-MUI. Akomodasi misalnya harus sesuai standar syariah dan memperoleh sertifikasi dari DSN-MUI. Standar syariah tersebut meliputi aspek produk, pelayanan dan pengelolaan. Jika standar pengelolaan belum memenuhi syariah, maka akomodasi paling sedikit telah tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci, tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah, tersedia makanan dan minuman halal, fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis, serta terjaganya kebersihan sanitasi dan lingkungan. Penyedia makanan dan minuman, meliputi restoran, kedai, bar, kafe, dan jasa boga. Penyedia makanan dan minuman wajib bersertifikat halal dan menjamin kehalalan makanan dan minuman yang disajikan, mulai dari penyediaan bahan baku sampai proses penyajian yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Jika belum memiliki sertifikat halal, setiap penyedia makanan dan minuman harus mencantumkan tulisan halal atau non halal pada setiap jenis makanan dan minuman. Penyedia makanan dan minuman juga harus menjaga lingkungan agar tetap sehat dan bersih. Setiap pengusaha spa, sauna, dan griya pijat halal harus menyediakan ruangan yang terpisah untuk perawatan untuk pria dan wanita, praktik terapi pikiran dan terapi fisik tidak mengarah kepada pelanggaran syariah, terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita. Pengusaha tersebut juga harus menyediakan sarana yang memudahkan pengunjung untuk shalat. Setiap pengusaha SPA, sauna dan griya pijat halal harus menggunakan produk berlogo halal resmi. Produk berlogo halal resmi tersebut antara lain

meliputi bahan rempah, lulur, masker, aroma terapi dan bahan-bahan perawatan wajah, rambut, tangan, dan kuku.

Dari sisi Pengelola biro perjalanan pariwisata halal harus memahami pengelolaan destinasi pariwisata halal, menyediakan informasi tentang paket pariwisata halal dan perilaku wisatawan pada destinasi pariwisata halal, menyelenggarakan paket perjalanan wisata yang sesuai dengan kriteria pariwisata halal menurut prosedur operasional standar yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.

Pramuwisata pada biro perjalanan pariwisata halal harus memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas, berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur, dan bertanggung jawab, berpenampilan sopan sesuai dengan nilai dan etika islami dan memberikan nilai-nilai Islami selama dalam perjalanan wisata (Perda No. 2 Tahun 2016). Harus dikatakan bahwa setelah pemberlakuan perda wisata halal di NTB, jumlah hotel yang bersertifikat halal belum banyak, menurut catatan MUI NTB, jumlah hotel yang sudah bersertifikat halal di NTB baru sekitar 11 hotel. Jumlah ini tentu terbilang kecil mengingat jumlah hotel di NTB mencapai 300 hotel. Tetapi menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB, sudah ada sekitar 100 hotel di NTB yang bersertifikat halal. Yang cukup meningkat adalah sertifikat halal untuk restoran, rumah makan, dan produk olahan UMKN. Menurut data LPPOM MUI NTB, Pada tahun 2016, ada 676 sertifikasi halal yang terbit, terdiri dari 28 sertifikat halal untuk restoran hotel, 107 sertifikat untuk restoran non hotel, 262 sertifikat untuk rumah makan dan catering, 279 sertifikat untuk produk olahan (Usaha Mikro, Kecil dan menengah, UMKM)). Meskipun telah diatur dalam perda, travel dan SPA yang bersertifikat halal belum banyak bermunculan. Ada dua travel yang menonjol, yakni Lombok Syariah Travel dan LombokWisata Syariah. Tidak ada data resmi yang dapat

dirujuk untuk menjelaskan berapa jumlah travel dan SPA syariah setelah berlakunya perda wisata halal di NTB.

Aturan perda tersebut tersirat bahwa yang *pertama* segala sesuatu harus sesuai dengan Standar syariah tersebut meliputi aspek produk, pelayanan dan pengelolaan. Standar syariah secara penuh ini disebut dengan tingkatan hilal 2.

Selanjutnya yang *kedua* jika standar pengelolaan belum memenuhi syariah, maka akomodasi paling sedikit telah tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci, tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah, tersedia makanan dan minuman halal, fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis, serta terjaganya kebersihan sanitasi dan lingkungan. Standar yang belum sepenuhnya memenuhi standar syariah ini disebut hilal 1.

Hal ini sebagai bentuk pilihan dari pemerintah NTB menjadi sebuah produk wisata yaitu produk wisata halal dengan konsep hilal 1 yang ditawarkan oleh pemerintah NTB agar bisa diterima semua kalangan. Lebih lanjut tentang peningkatan promosi di bidang pariwisata halal meliputi menyediakan informasi peluang investasi di kawasan pariwisata, meningkatkan promosi investasi bidang pariwisata di dalam dan luar negeri, dan meningkatkan sinergi promosi penanaman modal pariwisata dengan sektor terkait. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota juga melaksanakan pemasaran dan promosi penyelenggaraan pariwisata halal.

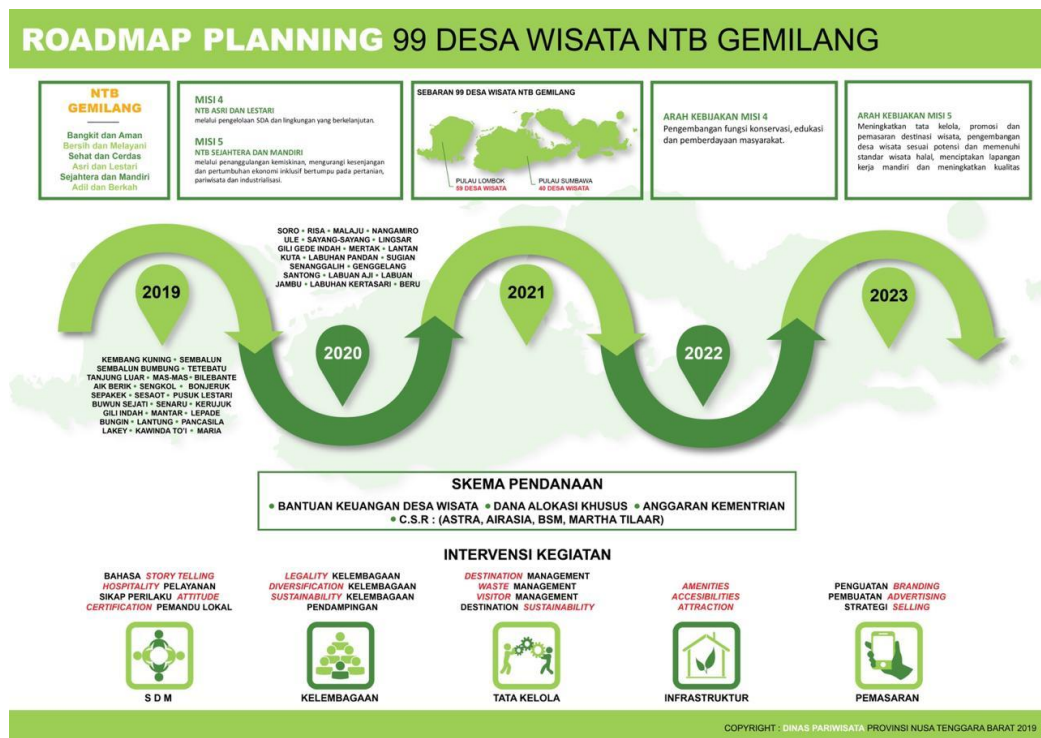
Untuk pengembangan pariwisata halal di NTB, baik berupa wisata wisata alam (ekowisata: seperti gunung, air terjun, pantai, dan lainnya), wisata belanja, wisata edukasi, wisata kuliner, budaya, wisata berburu dan jenis wisata lainnya. Untuk pengembangan sendiri wisata halal ataupun wisata konvensional sendiri dengan bergantinya era kepemimpinan baru

atau gubernur baru mengarahkan dari sisi wisata aspek budaya ataupun desa wisata.

Salah satu misi dari kepemimpinan gubernur baru Bang Zul-Umi Rohmi adalah mewujudkan Desa Wisata. Jelas tergambar dari program yang dibuat di mana akan diberikan dana insentif satu milyar bagi desa-desa yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi Desa Wisata. Langkah ini menurut penulis sangat strategis dalam rangka mengembangkan kelanjutan dari keberadaan wisata halal.

Program tersebut dinamakan dengan 99 Desa Wisata NTB gemilang. Untuk memudahkan dalam pencanangannya gubernur terpilih membuat roadmap planningnya.

Roadmap planning 99 Desa Wisata NTB gemilang



Hal ini menjadi sasaran pengembangan ke depan tahun 2019-2023 wisata halal jenis wisata budaya yang berkearifan lokal. Target yang ingin dicapai sebanyak 99 desa wisata selama periode tersebut. Wisata halal

yang berbentuk desa wisata diharapkan menjadi jembatan antara wisata dan kearifan lokal warga setempat.

Wisata yang ramah terhadap peradaban islami. Wisata yang muatannya berbeda khasnya dengan wisata umumnya yang telah dikenal. Wisata Desa merupakan masa depan dari jargon wisata halal itu.

Ini dikarenakan desa sebagai entitas komunitas masyarakat mempunyai beberapa keunikan dengan entitas komunitas masyarakat kota yang cenderung berbau berdasarkan spesifikasi keahlian. Desa sebagai komunitas yang agak seragam, di mana di Indonesia umumnya sering diidentifikasi sebagai masyarakat agraris dan nelayan dengan sentuhan *industry* madya mempunyai mekanisme *control social* yang masih cukup tinggi.

Dengan demikian terdapat mekanisme pengawetan nilai-nilai, norma-norma berdasarkan agama dan kearifan lokal. Dengan prasyarat-prasyarat tersebut memungkinkan pariwisata dapat diformat ulang. Dari keberadaan pariwisata konvensional menjadi pariwisata yang sengaja didesain bagi sebuah tujuan.

Bagaimanapun pariwisata jika ditilik dari sosiologi wisata mengkaji pula mengenai interaksi timbal balik antara wisatawan dengan masyarakat lokal. Interaksi inilah variabel amatan yang memungkinkan bagi menilai ada tidaknya hubungan saling mempengaruhi antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang (*touris*). Dalam konteks inilah kemudian Desa Wisata dapat diformat sedemikian rupa untuk dapat memberikan warna (penyajian) yang berbeda terhadap para *touris* yang datang.

Jikalau pariwisata selama ini banyak dikritik dikarenakan memberikan pengaruh yang kurang cocok dengan peradaban dan moralitas masyarakat setempat maka Desa Wisata yang telah didesain sedemikian

rupa dapat menjadi titik balik. Ini juga sudah coba dipraktikkan di beberapa desa Wisata yang peneliti ketahui. Sebut misalnya wisata Desa Sasak Ende.

Desa wisata sasak ende juga mencoba memberikan pelayanan sesuai dengan standar lokal. Di desa tersebut sebagai desa Wisata di sana mencoba menawarkan kearifan-kearifan lokal yang dimiliki untuk sekaligus disuguhkan kepada touris-touris yang berkunjung.

Desa wisata yang khas, karena di desa ini disajikan hal yang berbeda dengan tetap turun temurun menjaga adat budaya setempat dengan menghilangkan unsur-unsur kesyirikan. Hal yang menjadi daya Tarik di desa ini ialah keunikan bangunan tempat tinggal yang lantainya dalam beberapa waktu dibersihkan dengan menggunakan kotoran sapi yang masih hangat. Hal ini menjadi salah satu wujud rasa terima kasih mereka terhadap hewan ternak yang dari dahulu membantu mereka dalam membajak sawah garapan. Peneliti paham betul bahwa masyarakat lokallah yang menjadi subyek dengan segala keunikannya.

Dengan model interaksi di Desa-desa Wisata yang telah didesain sedemikian rupa sesungguhnya terdapat nafas wisata halal. Wisata yang tidak kontraproduktif dengan adat budaya masyarakat lokal, sehingga pariwisata itu dapat dimaklumi menjadi jalan untuk memberikan sesuatu yang “berharga” kepada tamu-tamu yang datang umumnya dari Negara-negara maju (Barat umumnya).

Desa-Desa Wisata lainnya yang banyak disemaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Bang Zul-Ummi Rohmi juga menerapkan SOP standar kearifan lokal yang tentunya dengan berbagai variasi penyajian sehingga pariwisata tidak terus tertuduh sebagai biang merosotnya moralitas, sehingga pariwisata tidak melulu dikeluhkan tetapi menjadi media untuk melibas degradasi moralitas itu sendiri.

Selain desa pariwisata halal yang dicanangkan tersebut pemerintah daerah juga mendorong industri pariwisata konvensional untuk menyediakan: arah kiblat di kamar hotel, informasi masjid terdekat, tempat ibadah bagi wisatawan dan karyawan muslim, tempat fasilitas yang terpisah antara laki-laki dan perempuan dan memudahkan untuk bersuci.

Sehingga antara wisata konvensional secara umum dan wisata halal itu saling berdampingan, sebagai wujud dari sebuah wahana model produk ataupun pilihan yang bisa dipilih oleh para wisatawan. Sehingga destinasi wisata halal yang tidak mematikan wisata lainnya dan juga merupakan sebuah wahana model produk pilihan (*choice*) secara khusus yang ada di Nusa Tenggara Barat dianggap berhasil dapat menarik kunjungan wisatawan lokal, nasional maupun mancanegara bisa menikmati keseluruhan produk wisata yang ada di provinsi nusa tenggara barat. Selanjutnya dari sisi pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengembangkan kelanjutan dari pariwisata halal yang sudah ada dengan mencanangkan 99 desa wisata halal yang berkearifan lokal.

b. Dampak pengembangan wisata halal terhadap PAD

Pariwisata Indonesia yang pertumbuhan sektor wisatanya tercepat dan menjadi sektor ekonomi terbesar karena kontribusi terhadap devisa negara terbesar kedua setelah industri kelapa sawit yang mencapai USD 15.965 Miliar pada tahun 2016 sedangkan pariwisata menduduki kedua mencapai USD 13.568 Miliar pada tahun 2016, sedangkan pada tahun 2015 sektor pariwisata berada di posisi keempat yang memberikan kontribusi terhadap devisa dengan capaian USD 12.225 Miliar di bawah Minyak dan Gas (USD 18.574 Miliar), Kelapa Sawit (USD 16.427 Miliar), Batu Bara (USD 14.717 Miliar). Hal ini juga menjadikannya sektor unggulan karena beberapa hal, yaitu: jumlah destinasi dan investasi pariwisata yang

meningkat menjadikannya faktor kunci dalam menciptakan lapangan kerja, infrastruktur, pengembangan usaha, hingga pendapatan dari ekspor. Indonesia memproyeksikan pada tahun 2019 sektor ini dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 15 persen, dengan kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara, 275 juta perjalanan yang dilakukan wisatawan nusantara, dan diharapkan mampu menyerap tenaga kerja hingga 13 juta.

Kebijakan luar negeri dengan melakukan diplomasi publik melalui pembangunan wisata halal tentunya secara rasional ingin memenuhi kepentingan nasional, dalam hal ini adalah mencapai kepentingan dalam bidang ekonomi dengan menarik kunjungan wisatawan Muslim sebagai target pasar utama. Pariwisata dan ekonomi memiliki keterkaitan yang kuat, seiring berkembangnya pariwisata di suatu daerah sangat memungkinkan untuk berkembangnya perekonomian di daerah tersebut. Hubungan keduanya saling melengkapi, ekonomi akan tumbuh jika ditopang oleh perkembangan wisata yang semakin maju, terutama bagi pelaku usaha sekitar destinasi wisata, baik pelaku usaha kecil, menengah, maupun yang besar. Menurut Coopermodel ekonomi pariwisata ada tiga unsur yang terkait, yaitu:

- 3) konsumen dalam hal ini adalah wisatawan;
- 4) mata uang yang beredar sebagai unsur dalam transaksi ekonomi;
- 5) adanya barang dan jasa dari sektor ekonomi.

Hipotesis menarik yang dikemukakan oleh Muhammad Afdi Nizar tentang hubungan antara pariwisata dan ekonomi yang kausalitas, yakni:

- 1) pertumbuhan ekonomi ditopang oleh pariwisata, maka dari itu pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh perkembangan pariwisata (*tourism-led economic growth hypothesis*);

- 2) pariwisata ditopang oleh ekonomi, sehingga perkembangan wisata dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi (economic-driven tourism hypothesis);
- 3) keduanya (ekonomi dan pariwisata) memiliki manfaat satu sama lain dan bersifat dua arah (reciprocal causal hypothesis).

Lalu, Nizar berpendapat bahwa ada dua hal yang membangun adanya hubungan antara pariwisata dan ekonomi, yakni:

- 3) pariwisata berdampak pada ekonomi karena dapat menciptakan lapangan kerja, berpengaruh terhadap pendapatan, neraca pembayaran, penerimaan devisa dari beberapa hal, seperti belanja wisatawan, pembangunan pariwisata, impor maupun ekspor barang dan lain-lain;
- 4) pariwisata dapat menjadi efek stimulus bagi produk-produk tertentu dan dapat membentuk komunitas-komunitas yang diharapkan hal tersebut dapat menggerakkan ekonomi daerah ke arah yang positif dengan diciptakannya lapangan kerja baru dan meningkatnya pendapatan bagi daerah.

Menurut Cohen dalam bahwa dampak pariwisata terhadap ekonomi dapat secara umum, yakni dapat menjadi sumber devisa, sumber penghasilan masyarakat, pendapatan bagi pemerintah, tercipta lapangan kerja, pengaruh terhadap harga dan tarif, pengaruh pada distribusi keuntungan maupun manfaat, pengaruh terhadap pengelolaan maupun kepemilikan, dan tentunya dapat mempengaruhi pembangunan. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi penghasilan terkait pariwisata, diantaranya tingkat konsumsi atau pengeluaran, jarak dari tempat wisata, masa kerja dan jumlah wisatawan yang berkunjung.

Sedangkan Dian Dinta Herlambang berpendapat setidaknya ada empat hal yang dapat dipengaruhi oleh pariwisata terhadap kondisi ekonomi di tempat wisata, yakni: a) jenis pekerjaan, masyarakat menjadi

memiliki pekerjaan, seperti pedagang asongan, lalu menjadi pegawai di tempat wisata (penjual tiket masuk, pengawas keamanan, pengelola sampah dan lain-lain); b) pendapatan masyarakat juga tentunya akan merasakan dampak dari pembangunan pariwisata; c) tumbuhnya sektor lain di sekitar tempat wisata, berdirinya warung-warung, ada penginapan yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat sekitar; d) di tempat wisata juga makanan maupun minuman akan mengalami perubahan harga yang dapat menjadi keuntungan bagi pedagang. Menurut pengaruh pembangunan pariwisata terhadap perekonomian dapat mengubah beberapa hal, yakni: berubahnya jenis pekerjaan, pendapatan masyarakat, pembagian kerja, serta kesempatan kerja maupun wirausaha.

Secara garis besar, pariwisata memiliki peran penting dalam meningkatkan sektor ekonomi, usaha lokal akan tumbuh, pekerjaan dapat tercipta, pendapatan juga beragam, hal ini yang menjadikan bahwa pariwisata sangat berdampak terhadap ekonomi suatu daerah. Jadi, ekonomi dan pariwisata memiliki keterkaitan yang sangat kuat dan saling satu dengan yang lainnya. Pariwisata dapat dijadikan sebagai penggerak ekonomi daerah wisata yang tahan terhadap krisis ekonomi, mudah dan murah untuk dikembangkan, serta ekonomi menjadi unsur dalam membantu perkembangan wisata, terutama wisata halal diharapkan mampu sebagai tonggak perekonomian daerah Nusa Tenggara Barat dengan potensi wisata halal dunia yang terus mengalami peningkatan sebagai alternatif penggerak perekonomian dengan meningkatkan kunjungan wisata dan investasi ke NTB yang menjadikan Timur Tengah sebagai target pasar wisata.

Untuk menyambut potensi wisata tersebut, Indonesia menjadikan pariwisata sebagai sektor utama dalam pembangunan nasional selain pertanian/perkebunan, minyak dan gas, serta pertambangan, seperti

membuat perencanaan pembangunan pariwisata tahun 2015-2019. Pada tahun 2014 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 9 juta orang, dan diharapkan pada tahun 2019 mencapai 20 juta orang, sedangkan wisatawan domestik melakukan perjalanan wisata yang pada tahun 2014 mencapai 250 juta orang, diharapkan pada tahun 2019 mencapai 275 juta orang, dengan harapan mempengaruhi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2014 mencapai 4,2%, diharapkan pada tahun 2019 mencapai 8%. Selain itu diharapkan pada tahun 2019 memberikan kontribusi bagi devisa mencapai Rp. 240 triliun sedangkan pada tahun 2014 hanya mencapai Rp. 120 triliun. Sehingga diharapkan pertumbuhan secara inklusif dapat meningkatkan usaha lokal dalam bidang pariwisata dan tenaga kerja yang tersertifikasi.⁷⁵

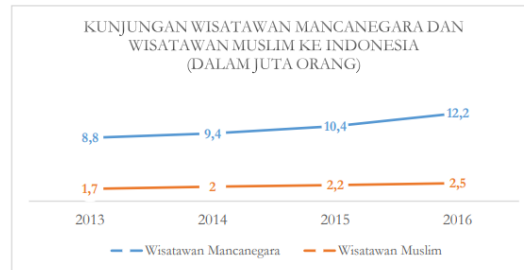
Lebih lanjut data yang didapatkan dari Dinas Pariwisata NTB dan dari data Bank Indonesia terkait Perkembangan wisata halal juga mengalami peningkatan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB bahwa menyebutkan pertumbuhan ekonomi daerah ini tanpa sektor tambang pada tahun 2016 mencapai 5,72 %/tahun meningkat di tahun 2017 mencapai 7,10 %/tahun dan pada tahun 2018 meskipun terjadi gempa tetap meningkat menjadi 7,23 %/tahun.⁷⁶

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia dan terutama Nusa Tenggara Barat sebagai destinasi wisata halal mengalami peningkatan.

Bagan 1. Kunjungan Wisatawaan Muslim ke Indonesia

⁷⁵ Deputi Bidang Ekonomi, 2014, h. 2

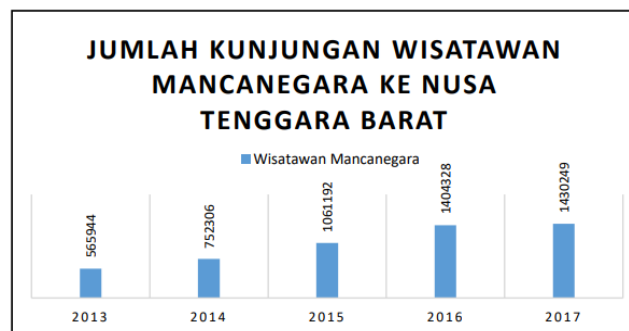
⁷⁶Data bank Indonesia, kajian ekonomi regional, *Laporan perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat*.



Sumber: Kementerian Pariwisata RI

Sedangkan Nusa Tenggara Barat sendiri jumlah kunjungan wisatanya juga mengalami peningkatan, berikut ini data Bagan 2. tentang kunjungan wisatawan mancanegara.

Bagan 2. Kunjungan Wisatawan ke NTB.



Kunjungan wisatawan mancanegara ke provinsi Nusa Tenggara Barat pun sudah mulai terlihat hasilnya, wisatawan asal Timur Tengah pada tahun 2014 mencapai 405 wisatawan, naik hingga 935 wisatawan pada tahun 2016, diikuti oleh wisatawan asal Malaysia yang mencapai 502 orang pada tahun 2014, mencapai 1.719 wisatawan pada tahun 2016 dan penerbangan dari Malaysia yang biasanya didominasi oleh tenaga kerja, sekarang memiliki tren positif dipenuhi wisatawan asal Malaysia. Berbagai investor asing pun juga mulai berdatangan untuk meninjau pembangunan pariwisata yang ada di Nusa Tenggara Barat, seperti investor asal Australia berjumlah 15 orang datang meninjau beberapa titik di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dengan luas 1.200 hektar. Selain asal Australia, tentu target utama adalah investor asal Timur Tengah, Perusahaan Maarij

Capital dari Arab Saudi yang tertarik untuk berinvestasi wisata halal di NTB terutama di KEK Mandalika yang disiapkan 250 hektar untuk wisata halal.⁷⁷

Perkembangan wisata halal juga mengalami peningkatan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB, setidaknya terlihat dari data yang dirilis Dinas Pariwisata NTB dan dari data Bank Indonesia yang menyebutkan pertumbuhan ekonomi daerah ini tanpa sektor tambang pada tahun 2016 mencapai 5,72 %/tahun meningkat di tahun 2017 mencapai 7,10 %/tahun dan pada tahun 2018 meskipun terjadi gempa tetap meningkat menjadi 7,23 %/tahun.

2. Kebijakan hukum dalam pengembangan wisata halal di kawasan Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan hasil penelitian tentang kebijakan hukum dalam pengembangan wisata halal di kawasan Nusa Tenggara Barat yang telah dilakukan penelitian dapat diklasifikasi bahwa hasil penelitian ini dapat dilihat dalam uraian berikut ini.

Gagasan dalam Peraturan Gubernur NTB Nomor 51 Tahun 2015 tentang Wisata Halal dan Peraturan Daerah Provinsi NTB nomor 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, dapat ditemukan pada pokok pikiran landasan filsafati yang tercermin dalam dasar menimbang.

Gagasan sebagai landasan filsafati dalam Peraturan Gubernur NTB Nomor 51 Tahun 2015 tentang Wisata Halal menegaskan :

- a. bahwa Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu destinasi wisata halal di Indonesia, maka Pemerintah Daerah dan semua pemangku kepentingan harus menyiapkan fasilitas dan sarana pariwisata yang memenuhi Wisata Halal pada industri pariwisata di Daerah;

⁷⁷Alwafi Ridho Subarkah, *Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat)*, Jurnal Sospol, Vol 4 No 2 (Juli – Desember 2018), h. 65-67.

- b. bahwa untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan dalam berwisata sesuai dengan konsep usaha pariwisata halal yang merupakan konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan pariwisata dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah perlu diatur suatu kebijakan pengelolaannya;

Makna yang tersirat dan tersurat dalam dasar menimbang menegaskan kepada pemerintah daerah dan semua pemangku kepentingan agar mengintegrasikan nilai-nilai syariah yang teroperasionalkan ke dalam rancangan fasilitas dan sarana berujung kepada rasa keamanan dan kenyamanan dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan yang datang ke Nusa Tenggara Barat.

Sedangkan gagasan sebagai landasan filsafati dalam Peraturan Daerah Provinsi NTB nomor 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal menegaskan :

- a. bahwa pariwisata merupakan salah satu aspek pembangunan di bidang ekonomi yang mampu mempercepat perkembangan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pemangku kepentingan industri pariwisata, baik Pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, swasta dan seluruh elemen masyarakat, bekerjasama untuk mengembangkan usaha Pariwisata Halal;
- c. bahwa Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia, maka setiap pemangku kepentingan industri pariwisata harus menyiapkan fasilitas dan sarana pariwisata yang memenuhi Pariwisata Halal;
- d. bahwa usaha Pariwisata Halal merupakan konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan pariwisata dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah;

Kandungan gagasan yang tersirat dan tersurat berorientasi pada giat pembangunan di bidang ekonomi Propinsi Nusa Tenggara Barat diyakini

pengembangan potensi industri wisata pada umumnya. Serta dikembangkan pilihan pariwisata halal secara bersama sama oleh pemangku kepentingan secara lintas dan terkoordinir dengan baik antara Pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, swasta dan seluruh elemen masyarakat, bekerjasama untuk mengembangkan usaha Pariwisata Halal. Melalui program pemenuhan fasilitas dan sarana sebagai hasil integrasi nilai-nilai syariah dalam mempermudah layanan berbasis kemanan dan kenyamanan bagi wisatawan muslim khususnya. Hal tersebut selaras dengan maksud dan tujuan dikembangkannya industri pariwisata sebagaimana diatur dalam Pasal 2 yang menegaskan :

Maksud pengaturan Pariwisata Halal dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan bagi wisatawan dan pengelola dalam kegiatan kepariwisataan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Pariwisata Halal adalah sebagai pedoman bagi pengelola pariwisata dalam memberikan pelayanan Pariwisata Halal kepada wisatawan.

Dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi NTB nomor 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal sebagai sumber hukum yang lebih kuat serta menyempurnakan dari Peraturan Gubernur NTB Nomor 51 Tahun 2015 tentang Wisata Halal.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi NTB nomor 2 tahun 2016 tentang Pariwisata memiliki tatanan norma yang mengintegrasikan nilai nilai syariah dalam menata Industri Pariwisata Konvensional sebagaimana diatur dalam Pasal 11 pada Bab V tentang Industri Pariwisata Bagian Kesatu tentang Industri Pariwisata Konvensional menegaskan:

- (1) Industri pariwisata konvensional adalah usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang tidak berpatokan pada prinsip-prinsip syari'ah.
- (2) Industri pariwisata konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan:
 - a. arah kiblat di kamar hotel;
 - b. informasi masjid terdekat;
 - c. tempat ibadah bagi wisatawan dan karyawan muslim;
 - d. keterangan tentang produk halal/tidak halal;
 - e. tempat berwudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan;
 - f. sarana pendukung untuk melaksanakan sholat; dan
 - g. tempat urinoir yang terpisah antara laki-laki dan perempuan dan memudahkan untuk bersuci.

Pasal 11 tersebut di atas, mengatur dan memberikan ruang agar di dalam pengelola industri pariwisata konvensional tetap untuk memberikan pelayanan kepada wisatawan dengan menyediakan fasilitas dan sarana berbasis syariah.

Pengaturan secara khusus tentang Industri pariwisata halal diatur dalam Pasal 12, Pasal 17 pada Bab V tentang Industri Pariwisata Bagian Kedua Industri Pariwisata Halal, Paragraf 1, Umum tepatnya di Pasal 12 menegaskan :

Industri pariwisata halal adalah usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang berpatokan pada prinsip-prinsip syari'ah sebagaimana yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Kandungan Pasal 12 tersebut mengakomodasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Kemudian dijabarkan dalam Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Industri Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas:
 - a. akomodasi;
 - b. biro perjalanan;
 - c. restoran; dan
 - d. SPA;
- (2) Pengelolaan industri pariwisata halal mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Pasal 14

- (1) Dalam Pariwisata Halal harus memiliki akomodasi sesuai standar syariah.
- (2) Standar syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh sertifikasi dari DSN-MUI.
- (3) Standar syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. produk;
 - b. pelayanan; dan
 - c. pengelolaan.
- (4) Dalam hal standar syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, maka akomodasi paling sedikit memenuhi halhal sebagai berikut:
 - a. tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci;
 - b. tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah;
 - c. tersedia makanan dan minuman halal;
 - d. fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis; dan
 - e. terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.

Pasal 15

- (1) Penyedia makanan dan minuman dalam Pariwisata Halal meliputi restoran, bar (kedai), kafe, dan jasa boga.
- (2) Penyedia makanan dan minuman bersertifikasi halal wajib menjamin kehalalan makanan/minuman yang disajikan, mulai dari penyediaan bahan baku sampai proses penyajian yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
- (3) Dalam hal sertifikat halal belum terpenuhi, setiap penyedia makanan dan minuman harus mencantumkan tulisan halal/nonhalal pada setiap jenis makanan/minuman; dan terjaga lingkungan yang sehat dan bersih.

- (4) Makanan dan minuman halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai standar yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Pasal 16

Setiap pengusaha SPA, Sauna dan Griya Pijat (Massage) halal menyediakan:

- a. ruangan perawatan untuk pria dan wanita yang terpisah;
- b. terapi pikiran (*mind therapy*) dan terapi olah fisik tidak mengarah pada pelanggaran syari'ah;
- c. terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita; dan
- d. sarana yang memudahkan untuk sholat.

Pasal 17

- (1) Setiap pengusaha SPA, Sauna dan Griya Pijat halal wajib menggunakan produk berlogo halal resmi.
- (2) Produk berlogo halal resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. bahan rempah;
 - b. lulur;
 - c. masker;
 - d. aroma terapi; dan
 - e. bahan-bahan perawatan wajah, rambut, tangan dan kuku.

(Perda No. 2 Tahun 2016). Harus dikatakan bahwa setelah pemberlakuan perda wisata halal di NTB, jumlah hotel yang bersertifikat halal belum banyak, menurut catatan MUI NTB, jumlah hotel yang sudah bersertifikat halal di NTB baru sekitar 11 hotel. Jumlah ini tentu terbilang kecil mengingat jumlah hotel di NTB mencapai 300 hotel. Tetapi menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB, sudah ada sekitar 100 hotel di NTB yang bersertifikat halal. Yang cukup meningkat adalah sertifikat halal untuk restoran, rumah makan, dan produk olahan UMK. Menurut data LPPOM MUI NTB, Pada tahun 2016, ada 676 sertifikasi halal yang terbit, terdiri dari 28 sertifikat halal untuk restoran hotel, 107 sertifikat untuk restoran non hotel, 262 sertifikat untuk rumah makan dan

catering, 279 sertifikat untuk produk olahan (Usaha Mikro, Kecil dan menengah, UMKM)). Meskipun telah diatur dalam perda, travel dan SPA yang bersertifikat halal belum banyak bermunculan. Ada dua travel yang menonjol, yakni Lombok Syariah Travel dan Lombok Wisata Syariah. Tidak ada data resmi yang dapat dirujuk untuk menjelaskan berapa jumlah travel dan SPA syariah setelah berlakunya perda wisata halal di NTB.

Aturan perda tersebut tersirat bahwa yang *pertama* segala sesuatu harus sesuai dengan Standar syariah tersebut meliputi aspek produk, pelayanan dan pengelolaan. Standar syariah secara penuh ini disebut dengan tingkatan hilal 2.

Selanjutnya yang *kedua* jika standar pengelolaan belum memenuhi syariah, maka akomodasi paling sedikit telah tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci, tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah, tersedia makanan dan minuman halal, fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis, serta terjaganya kebersihan sanitasi dan lingkungan. Standar yang belum sepenuhnya memenuhi standar syariah ini disebut hilal 1.

Hal ini sebagai bentuk pilihan dari pemerintah NTB menjadi sebuah produk wisata yaitu produk wisata halal dengan konsep hilal 1 yang ditawarkan oleh pemerintah NTB agar bisa diterima semua kalangan. Lebih lanjut tentang peningkatan promosi di bidang pariwisata halal meliputi penyediaan informasi peluang investasi di kawasan pariwisata, meningkatkan promosi investasi bidang pariwisata di dalam dan luar negeri, dan meningkatkan sinergi promosi penanaman modal pariwisata dengan sektor terkait. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota juga melaksanakan pemasaran dan promosi penyelenggaraan pariwisata halal.

Dari uraian singkat terkait gagasan dan tatanan Peraturan Daerah Provinsi NTB nomor 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Menempatkan Pemda NTB sebagai daerah pertama yang memiliki Perda Pariwisata Halal di Indonesia. Perda tersebut selain dimaksudkan sebagai pedoman bagi pengelola pariwisata dalam memberikan pelayanan pariwisata halal kepada wisatawan, juga dimaksudkan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman dan halal.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Dari sisi *road map* wisata halal yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengembangkan kelanjutan dari pariwisata halal yang sudah ada dengan mencanangkan 99 desa wisata halal yang berkearifan lokal. Pengembangan pariwisata syariah dengan menampilkan diri sebagai destinasi wisata halal yang tidak mematikan wisata lainnya dan juga merupakan sebuah wahana model produk pilihan (*choice*) secara khusus yang ada di Nusa Tenggara Barat dianggap berhasil dapat menarik kunjungan wisatawan mancanegara terutama wisatawan dari negara Muslim dan menarik investasi. Perkembangan wisata halal juga mengalami peningkatan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB, setidaknya terlihat dari data yang dirilis Dinas Pariwisata NTB dan dari data Bank Indonesia yang menyebutkan pertumbuhan ekonomi daerah ini tanpa sektor tambang pada tahun 2016 mencapai 5,72 %/tahun meningkat di tahun 2017 mencapai 7,10 %/tahun dan pada tahun 2018 meskipun terjadi gempa tetap meningkat menjadi 7,23%/tahun.
2. Pariwisata halal dari sisi kebijakan hukum yang ada di Nusa Tenggara Barat sudah mempunyai legitimasi hukum yang kuat, sehingga bisa menjamin kepastian hukum dalam pengembangan destinasi pariwisata halal. Sehingga destinasi pariwisata halal yang ada di Nusa Tenggara Barat arah kebijakannya jelas dalam gagasannya, sangat didukung oleh kebijakan, dan bertahap dalam implementasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang dijelaskan diatas, maka peneliti menyampaikan saran-saran yang bertujuan memberikan manfaat bagi pihak-pihak lain atas penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan peneliti sebagai berikut:

1. Kepada para pemerintah dan pemangku kepentingan agar terciptanya sinergi antara berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat dan unsur lainnya agar bisa menjelaskan kepada orang awam konsep wisata halal dengan jenjang hilal 1 dan 2 agar tidak terjadi *miss* informasi.
2. Bagi pemerintah pusat, akademisi, para *stake holder*, dan yang terkait lainnya agar bisa menjadikan aturan yang ada di NTB sebagai *rule model* kebijakan dalam pengembangan wisata halal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji, *Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam*, Jurnal Amwaluna, Vol.1 No.1, Januari, 2017.
- Adisasmita, Rahardjo, “*Pengembangan Wilayah Konsep dan Teori*”, Jakarta:Penerbit Graha Ilmu, 2008.
- Afroniyawati, Lies, *Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia*, Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik JKAP, Vol. 18 No.1, Mei 2014.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *Al-Mustasyfa min Ilmi al-Ushul, Tahqiq wa Tahliq Muhammad Sulaiman al-Asyqar*, (Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 1997), Juz ke-I.
- Al-Qarafy, Shihab al-Din, *Syarah Tanqih al-Fushul fi Ihtisar al-Mahsul fi Usul*, Mesir: Maktabah al-Khairiyah, tth.¹
- Anwar, Yesmil, Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grasindo, 2013.
- Arsyad, Lincolin, “*Ekonomi Pembangunan*”, Yogyakarta: BPFE , 1999, Edisi IV.
- Asmawi, *Teori Masalahah dan Relevansinya dengan PerUndang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag. RI, 2010.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat
- BAPPEDA PROVINSI NTB, *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional NTB*.
- BAPPEDA Provinsi NTB, Nusa Tenggara Barat dalam angka 2013.
- Bisri, Cik Hasan, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Chapra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Terjemahan Ikhwan Abidin B, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

- Chapra, M. Umer, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, Terjemahan Ikhwan Abidin B, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Data bank Indonesia, kajian ekonomi regional, *Laporan perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat*.
- Deputi Bidang Ekonomi, 2014.
- Endrawati, Netty, *Sistem Hukum dan Pembangunan Hukum*, Wastu, Volume Khusus, Desember 2007.
- Fahham, A. Muchaddam, *Tantangan Pengembangan Wisata Halal di Nusa Tenggara Barat*, Aspirasi Vol. 8 No. 1, Juni 2017.
- Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI(X) 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata
- Fernan Rahadi, lihat <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/03/16/omwaqj291-apakah-sesungguhnya-pariwisata-syariah>
- Hamzana, Adrian Adi, *Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal dalam Pengembangan Pariwisata di Nusa Tenggara Barat*, Jurnal Pena Justisia : Media Komunikasi dan Kajian Hukum, Vol. 17, No.2, 2017, h. 1.
- Ismayanti, *Pengantar Pariwisata*, Jakarta: PT Gramedia Widisarana, 2010.
- Kurniawan, Edi, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penalaran Hukum Islam*, artikel. t.d.
- Marzuki, Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.¹
- Mastercard & Crescentrating, *Global M Travel Index 2018*, GMTI, April 2018.
- Mastercard & Crescentrating, *Global Muslim Travel Index 2018*, GMTI, April 2018.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.
- Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

- Muhammad, Rahmad Kurniawan, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam (Kajian Spirit Ethico Legal atas Prinsip Taradin dalam Praktik Bank Islam Modern*, Malang: Intimedia, 2014.
- Outpacing The Mainstream, *State of the Global Islamic Economy Report 2017/2018*.
- P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Priyadi, Unggul, *Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2016.
- Qorib, Ahmad, *Ushul Fikih 2*, Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, Terjemahan Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1994.
- S. Riyanto, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, Jakarta: Buku Republika, 2012.
- Sedarmayanti, Gumelar S.Sastrayuda, Lia Afiza, *Pembangunan & Pengembangan Pariwisata*, Bandung: PTRefika Aditama, 2018.
- Setyosari, Punaji, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sofyan, Riyanto, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, Jakarta:Republika, 2012.
- Subarkah, Alwafi Ridho, *DIPLOMASI PARIWISATA HALAL NUSA TENGGARA BARAT*, Intermestic: Journal of International Studies, Volume 2, No. 2, Mei 2018.
- Subarkah, Alwafi Ridho, *Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat)*, Jurnal Sospol, Vol 4 No 2 (Juli – Desember 2018).
- Suharto, Edi, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: CV Alfabeta, 2008, h. 3.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, h. 1402.

Ulya, *Wisata Halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat*, lihat <https://ulyadays.com/wisata-halal-di-provinsi-nusa-tenggara-barat/>

Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Wardiyanto, *Perencanaan Pengembangan Pariwisata*, Bandung : Lubuk Agung, 2011.



PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL

Judul Penelitian:

Pengembangan halal food dikawasan wisata Indonesia

Direvisi

“Pengembangan Wisata Syariah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

(Studi Wisata Halal Nusa Tenggara Barat)”

Dasar Kegiatan : Direktur Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: 7211 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian pada PTKIN Tahun 2018

Pelaksanaan : 2018

Waktu : April – November 2018

Kelompok Peneliti

Ketua:

Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, S.H., M.H

Anggota:

Rahmad Kurniawan, S.E.Sy., M.E

Wahyu Akbar, S.E.Sy., M.E

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALANGKA RAYA

TAHUN 2018

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
a. Manfaat Teoritis	8
b. Manfaat Praktis	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teori	13
1. Teori Pembangunan Hukum	13
2. Teori Kebijakan Publik	21
3. Teori Sistem	24
4. Teori Maqashid Asy Syariah	26
C. Kerangka Konseptual	38
1. Pengembangan	38
2. Kosep Pariwisata Halal	39
3. Pembangunan Ekonomi Daerah	42
BAB III METODELOGI PENELITIAN	47
A. Metode Penelitian	47
B. Data dan Sumber Data Penelitian	48
C. Tempat dan Waktu Penelitian	49
D. Teknik Pengumpulan Data	50
1. Teknik Observasi	50
2. Teknik Wawancara	50
3. Dokumentasi	51

E. Analisis Data	51
F. Pemeriksaan Keabsahan Data	52
1. Kredibilitas	52
2. Transferabilitas	52
3. Dependabilitas	53
4. Konfirmabilitas	53
BAB IV PEMAPARAN DATA	54
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
1. Letak Geografi Provinsi Nusa Tenggara Barat	54
2. Gambaran Wisata Halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat	56
B. Penyajian Data Penelitian	62
1. Subjek Pertama Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Barat	63
2. Subjek Kedua Masyarakat	66
C. Analisis Data	69
1. Konsep Pengembangan Wisata Halal yang Ditawarkan di kawas- an Nusa Tenggara Barat	69
2. Kebijakan Hukum dalam Pembangunan Wisata Halal yang Di- tawarkan di kawasan Nusa Tenggara Barat	89
BAB V PENUTUP	96
 Lampiran	 41
1. Identitas Peneliti.....	42
2. Log Book	43
3. Laporan Keuangan	50

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALANGKA RAYA

BUKTI PENERIMAN DOKUMEN LAPORAN ANTARA

Judul : Pengembangan halal food dikawasan wisata Indonesia Direvisi
 “Pengembangan Wisata Syariah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Wisata Halal Nusa Tenggara Barat)”

Kluster : Penelitian Terapan dan Kajian Strategis Nasional

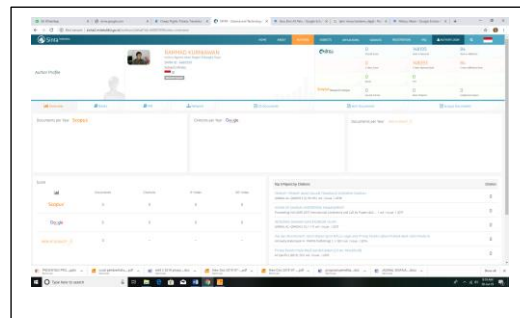
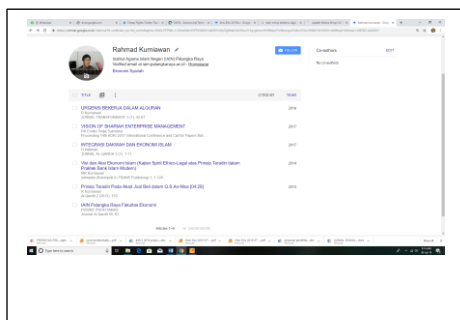
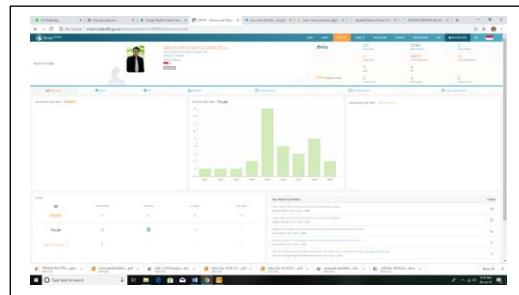
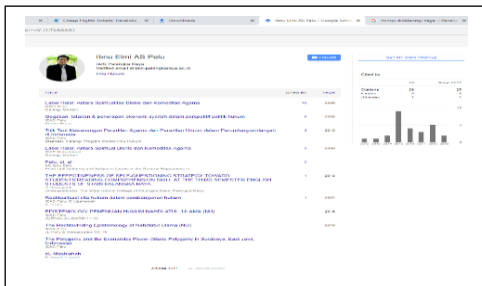
Ketua : Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, S.H., M.H

Anggota : Rahmad Kurniawan, S.E.Sy., M.E

Wahyu Akbar, S.E.Sy., M.E Pd

Biaya.....: 50.000.000,-

No	Uraian	Keterangan
1	Identitas Peneliti (email Institusi, ID Litapdimas, Google Scholar, Sinta)	
2	Log Book Penelitian	
3	Bab 1,2 dan 3	
4	Laporan Keuangan	



The screenshot shows a Google Scholar profile for Wahyu Atbar. The profile includes a blue graduation cap icon, the name 'Wahyu Atbar', and a list of publications. The first publication is 'Manajemen Zakat (Studi Kasus: Syarif Hidayatullah Islamic Education Center (SH-IEC) 103' by Wahyu Atbar, published in 2019. The second publication is 'Implementasi Zakat Managemen Zakat (Studi Kasus: G.S. Al-Taqwa) 101' published in 2017. The third publication is 'Wahyu Atbar: Produk dan Layanan Zakat' published in 2019. The profile also shows a 'Cited by' count of 1 and a 'My Bibliography' link.

Year	Title	Cited by	Year
2019	Manajemen Zakat (Studi Kasus: Syarif Hidayatullah Islamic Education Center (SH-IEC) 103	1	2019
2017	Implementasi Zakat Managemen Zakat (Studi Kasus: G.S. Al-Taqwa) 101	0	2017
2019	Wahyu Atbar: Produk dan Layanan Zakat	0	2019



LOG BOOK

Kluster Penelitian Terapan dan Kajian Strategis Nasional
Judul Penelitian: Pengembangan halal food dikawasan wisata Indonesia
 (revisi)

“Pengembangan Wisata Syariah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Wisata Halal Nusa Tenggara Barat)”

RINGKASAN CATATAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Catatan Kemajuan	Kendala
1	Sabtu, 30 Maret 2019	Perbaikan Proposal Penelitian: 1. Judul Penelitian lebih difokuskan kajiannya 2. Rumusan Masalah dibuat menyesuaikan kajian	1. Judul Awal yaitu Pengembangan halal food dikawasan wisata Indonesia → direvisi menjadi : “Pengembangan Wisata Syariah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Wisata Halal Nusa Tenggara Barat)” 2. Rumusan Masalah awal : ➤ Bagaimana konsep pengembangan halal food	Tidak ada kendala, setelah mendapatkan penjelasan dari <i>reviewer</i> semua bisa ditindaklanjuti oleh peneliti.

		3. Metode Penelitian Menyesuaikan Kajian	<p>yang ditawarkan di kawasan wisata Indonesia?</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Bagaimana kebijakan hukum dalam pengembangan halal food di kawasan wisata Indonesia? <p>Dispesifikan menjadi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Bagaimana konsep pengembangan wisata halal yang ditawarkan di kawasan Nusa Tenggara Barat? ➤ Bagaimana kebijakan hukum dalam pengembangan wisata halal di kawasan Nusa Tenggara Barat? <p>Metode Penelitian tidak perlu menggunakan dua metode, langsung ditetapkan saja arahnya ke penelitian lapangan (field research) di NTB dan untuk data kajian pustaka di mix saja di teoritik</p>	
2	Senin, 8 April 2019	Melakukan penentuan lokasi penggalan data di MUI dan DSN MUI	Data MUI dan DSN MUI	Informan masih belum ditentukan
3	Jumat, 12 April 2019	Menentukan kategori informan di Dinas Pariwisata Provinsi NTB	Data Dinas Pariwisata Provinsi NTB	Informan masih belum ditemukan
4	Senin, 01 Juli 2019	Rapat persiapan penelitian	Perlengkapan dan kesiapan tim peneliti	Izin dan legalitas
5	Penelitian Lapangan			

	Senin, 08 Juli 2019	Berangkat Ke Jakarta: Untuk Menggali data di MUI Pusat (Jl. Proklamasi No.51, RT.11/RW.2, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320) terkait FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 1 08/DSN-MUI/X/2016 Tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH	Hasil Observasi dan Wawancara: <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Hal Terkait - Gencarnya MUI Pusat terus mensosialisasikan tentang pariwisata syariah - Disarankan dari pengurus MUI Pusat untuk ke Dewan Syariah Nasional MUI langsung karena berbeda kewenangan. 	Tidak ada kendala, berjalan lancar, dikarenakan semua pengurus MUI yang terkait penelitian ada di lokasi
6	Selasa, 09 Juli 2019	Sesuai saran dari MUI Pusat ke Dewan Syariah Nasional MUI (Jl. Dempo No.19, RT.2/RW.7, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320) Sore berangkat ke Lombok, Nusa Tenggara Barat	Hasil Observasi dan Wawancara: <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Hal Terkait - Pihak DSN MUI terus mengkaji tentang pariwisata syariah dengan mencari model yang sesuai dengan karakter keindonesiaan tetapi tetap berpegang teguh konsep syariahnya 	Tidak ada kendala dalam observasi dan wawancara, pihak DSN MUI menyambut baik para peneliti
7	Rabu, 10 Juli 2019	Penelitian di Lombok 1. Dinas dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat (Jl. Langko No.70, Pejeruk, Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83114)	Hasil Observasi dan Wawancara: <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Hal Terkait (Pergub, Perda, Brosur, dan lainnya) - Pihak Dinas dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan gambaran terkait perkembangan wisata syariah 	Tidak ada kendala dalam observasi dan wawancara, pihak Dinas dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat menyambut baik para peneliti.

		<p>yang ada di NTB, mulai dari awal hingga Lombok memenangkan dua penghargaan World Halal Travel Awards (WHTA) 2015 dalam kategori World Best Halal Tourism Destination dan World Best Halal Honeymoon Destination. Serta terbaru ditahun 2018 NTB meraih Anugerah Syariah Republika Sebagai Destinasi Wisata Halal Terfavorit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dampak perkembangan pariwisata halal yang ada di NTB yang signifikan mempengaruhi terhadap minat pengunjung baik dari dalam maupun luar negeri untuk sehingga mempengaruhi juga PAD setempat baik dari sisi pemerintah, swasta maupun masyarakat <p>Berkunjung ke destinasi wisata halal yang ada di NTB 1. Desa Wisata Halal Montong, tanjung Bias Seluk</p>	<p>Hasil observasi di lapangan terkait desa wisata halal dimana konsep desa wisata halal yaitu sama dengan desa atau wisata pada umumnya tetapi lebih</p>
--	--	---	---

		<p>2. Desa Wisata Halal Sasak Ende</p>	<p>memudahkan pemenuhan ibadah muslim saat mereka berwisata seperti mushola dan juga makanan yang halal</p> <p>Desa wisata yang khas, karena di desa ini disajikan hal yang berbeda dengan tetap turun temurun menjaga adat budaya setempat dengan menghilangkan unsur-unsur kesyirikan. Hal yang menjadi daya Tarik di desa ini ialah keunikan bangunan tempat tinggal yang lantainya dalam beberapa waktu dibersihkan dengan menggunakan kotoran sapi yang masih hangat. Hal ini menjadi salah satu wujud rasa terima kasih mereka terhadap hewan ternak yang dari dahulu membantu mereka dalam membajak sawah garapan.</p>	
8	Kamis, 11 Juli 2019	<p>Lanjutan Berkunjung ke destinasi wisata halal yang ada di NTB</p> <p>1. Pantai Mandalika</p> <p>2. Pantai Tanjung Aan</p>	<p>Hasil observasi</p> <p>Menunjukkan bahwa destinasi wisata halal berupa pantai yang ada di NTB sama dengan wisata pantai pada umumnya tetapi lebih memudahkan pemenuhan ibadah muslim saat mereka berwisata seperti mushola, tempat bersuci, dan juga makanan yang halal</p>	

		MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat Berangkat Menuju Surabaya	Didapatkan hasil wawancara bahwa pihak pemerintah dan dinas terkait selalu berkoordinasi dalam membuat aturan dan lainnya terhadap wisata halal yang ada di NTB dengan MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat	
9	Jum'at, 12 Juli 2019	Surabaya mengunjungi salah satu wisata religi: Makam Sunan Ampel	Melakukan observasi terhadap objek wisata religi yang ada di Surabaya ✓ Memberikan gambaran bahwa konsep wisata halal dan konsep wisata religi agak berbeda karena kadang-kadang orang awam bisa salah persepsi. ✓ Masyarakat di negara mayoritas muslim seperti Indonesia cenderung melihat wisata halal sama dengan wisata religi. ✓ Wisata religi arahnya: pertama tujuan beribadah (<i>pilgrim</i>) seperti haji dan umroh. Kedua, wisata bersifat islami contohnya berwisata ke makam Sunan Ampel untuk melihat sejarah kebudayaan Islam di Indonesia ✓ Terkait wisata halal sendiri arahnay yakni untuk	

			memudahkan pemenuhan ibadah muslim saat mereka berwisata seperti mushola dan restoran halal dan lainnya	
10	Senin, 12 Agustus 2019	Persiapan kesuaian data	Penyesuaian data	Kesesuaian data perlu dipilah
11	Kamis, 15 Agustus 2019	Menyusun data di kota Palangka Raya	Draft data kota Palangka Raya	Kesesuaian data perlu dipilah
13	Sabtu, 31 Agustus 2019	Pelacakan data	Data	Kesesuaian data perlu dipilah
14	Selasa, 24 September 2019	Rapat penelitian di kota Palangka Raya	Perlengkapan dan kesiapan tim peneliti	Izin dan legalitas
15	Rabu, 25 September 2019	Analisis penelitian	Draft hasil analisis	Tidak ada kendala
16	Kamis, 26 September 2019	Penyusunan laporan penelitian	Draft laporan penelitian	Tidak ada kendala
17	Jumat, 27 September 2019	Rapat Akhir tim peneliti	Hasil penelitian dan laporan	Tidak ada kendala
18	Minggu, 29 September 2019	Seminar hasil dan Coaching Hasil Penelitian	Pematangan hasil penelitian oleh Dr. Miftahul Huda, M.Ag	Tidak ada kendala

Dokumentasi Penelitian Lapangan

MUI Pusat Jakarta





DSN MUI Pusat Jakarta





Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi NTB





Destinasi Wisata Halal di NTB



Desa Wisata Halal Montong, tanjung Bias Seluk





Desa Wisata Halal Montong, tanjung Bias Seluk





Desa Wisata Halal Kampung Sasak Ende





Desa Wisata Halal Kampung Sasak Ende







Wisata Pantai Mandalika





Novotel Mandalika, the best halal honeymoon destination





Wisata Pantai Tanjung Aan







Rumah makan berlabel halal





Hotel Syariah di Lombok



Mesjid Raya Lombok



Mesjid Tua NTB





Makam Batu layar

MUI NTB



